

**IMPLEMENTASI *PROFIT AND LOSS SHARING* BERBASIS *AL-ADL*  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI  
BAWANG MERAH DI KECAMATAN ANGERAJA  
KABUPATEN ENREKANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**ASTUTI. L**  
**NIM: 90100116072**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astuti. L  
NIM : 90100116072  
TTL : Taulo, 12 Maret 1998  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo, Samata  
Judul : Implementasi *Profit And Loss Sharing* Berbasis *Al-Adl* Dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau bahkan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Samata, 07 September 2020

Penyusun,

Astuti.L  
NIM: 90100116072



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 51 Makassar ☎ 0411 364724 Fax: 364723  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo Rimangguling Gowa ☎ 424815 PARAKKASI

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang" yang disusun oleh Aatuti, I., NIM 90100116072, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2020, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, 2 November 2020

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris	Dr. Hj. Rahmawati Mun, M.Ag.
Pembimbing I	Dra. Hj. Nurani Gani, MM
Pembimbing II	Dr. Nurchah Anwar, S.H.I., M.E.I.
Penguji I	Dr. Muht. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si. Ak.
Penguji II	Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 1966130 190303 1 003

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan hidayahnya sehingga penulis di beri kesehatan sehingga skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI *PROFIT AND LOSS SHARING* BERBASIS *AL-ADL* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI BAWANG MERAH DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG** dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga datangnya hari akhir nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menuntut kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai dengan pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat untuk bimbingan dan saran-saran sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan. Khususnya kepada kedua orangtua yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun bentuk kebaktian saya hanya sebatas ini. Rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi ingin penulis sampaikan terutama kepada:

1. Allah SWT. yang selalu memberikan kemudahan dan kesabaran kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.d., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para pembantu Rektor serta seluruh jajaran yang senantiasa memberikan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Ahmad Efendi, SE., M. Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan bapak Akrammunas, SE., M. M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. Hj. Nuraeni Gani, MM selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dr. Nurfiyah, S. HI., M. EI. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Wahyudin Abdullah SE., M. Si., Ak. selaku penguji I dan Bapak Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM selaku penguji II, yang juga telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Untuk Penguji Konprehensif Bapak Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag, Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag dan Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag yang telah mengajarkan saya bahwa dalam proses pembelajaran ketekunan merupakan landasan utama seseorang dalam menghadapi dan menjalaninya.
8. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Ekonomi Islam, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan selalu siap membantu kebutuhan mahasiswa dalam hal pengurusan yang berkaitan dengan perkuliahan.
9. Terima kasih juga tak terhingga kepada kedua orang tua saya Bapak Lahaming dan Ibu Mari yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Dan juga kepada kak dan ade saya Ramlan, Yusuf, Nadila, Daus serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk teman-teman Jurusan Ekonomi Islam 2016 khususnya teman-teman Ekonomi Islam B yang telah menemani penulis selama 8 semester yang juga merupakan motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat dan seperjuangan saya yang selalu memberikan bantuan berupa masukan, saran dan solusi dan juga merupakan salah satu dari sekian motivasi saya yakni Padliani, Nur Rahmatullah, Sri Ayu Lestari.
13. Kepada keluarga KKN Kec Tellulimpoe Kelurahan Mannanti Kabupaten Sinjai yang telah berperan dalam kegiatan KKN selama satu bulan.

14. Untuk semua teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan, semangat dan pengertian secara tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara yang kita cintai ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini. Sebagai hamba yang penuh keterbatasan, kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala kerendahan hati kami membuka diri atas saran dan kritikan dari pembaca yang budiman untuk penyempurnaan skripsi berikutnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

**Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Samata, 07 September 2020

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

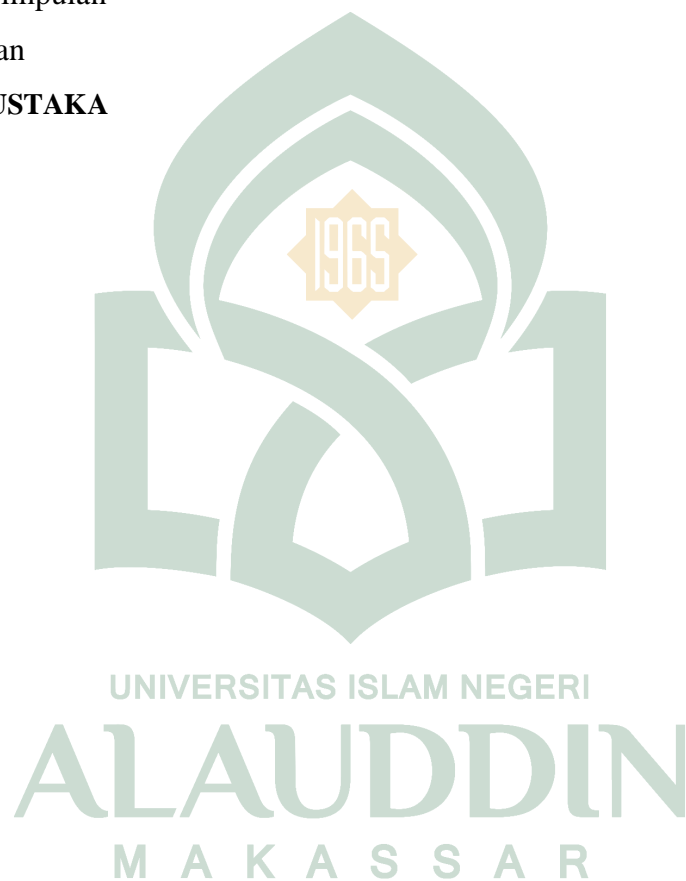
Astuti.L  
NIM: 90100116072

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	<b>20</b>
A. Konsep Profit and loss sharing	20
B. Ketentuan Perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960	23
C. Makna Al-Adl Dalam Hukum Islam	25
D. Akad Kerjasama pertanian Dalam Islam	30
E. Konsep Kesejahteraan	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data	51
D. Jenis Pengumpulan Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57



B. Penerapan profit and loss sharing pada kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang	61
C. Penerapan profit and loss sharing dalam konsep Al-adl pada kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang	74
D. Bagaimana penerapan <i>profit and loss sharing</i> dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>95</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Fokus penelitian dan Deskripsi fokus	16
Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut Desa dan Kelurahan Kec Anggeraja	59
Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin	60
Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut Umur	61
Tabel 4.4 Penerapan Profit And Loss Sharing pada pertanian Bawang Merah	76
Tabel 4.5 Penerapan PLS Berbasis Al-adl Pertanian Bawang Merah	81
Tabel 4.6 Profit And Loss Sharing Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani	92



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S/a	s/	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z/al	z/	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik dibawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>D}amah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anatara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	<i>Fath}ah dan ya&gt;</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fath}ah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ	<i>Fath}ah dan alif</i>	a>	A dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya&gt;'</i>	i>	I dan garis diatas
وُ	<i>D}ammah dan wau</i>	u>	U dan garis diatas

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

#### 4. *Ta>'marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>'marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>'marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta>marbu>t}ah* yang mati atau dapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>marbut}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al->d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. *Syaddah (tasydi>d)*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ) dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului dengan huruf *kasrah* (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>

Contoh:

عَلِيٍّ : *'ali*>(bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٍّ : *'arabi*>(bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam m'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apotrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berarti Alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*



## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliteasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam bahasa akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-qur'an (dari *al-qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi> z{ila>l al-qur'a>n*

*Al-sunnah qabl al-tadwi>n*

## 9. Lafz} al-jala>lah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : di>null>h

بِاللَّهِ : billa>h

Adapun *ta>'marbu>t}ah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

## 10. Huruf Kapital

walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dir tersebut, bukan huruf awal kata sandangnnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma> muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}I'a linna>si lallaz>I bi bukkata muba>rakan*

*Syahru Ramad}a>n al-laz/I unzila fi>h al-Qur'a>n*

*Nas}i>r al-Di>n alT{u>si>*

*Abu>> Nas}r al-Fara>bi>*

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu/. Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nasr}r H{ami>d Abu>)



## ABSTRAK

Nama : Astuti.L

Nim : 90100116072

Judul : Implmentasi *profit and Loss Sharing* Berbasis *Al-adl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

---

Skripsi ini berjudul Implementasi *profit and loss sharing* berbasis *al-adl* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan pembagian *profit and loss sharing* berbasis *al-adl* kerjasama pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Teknik penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pemilik lahan, Penggarap lahan. Adapun analisis yang digunakan dalam analisis data yakni, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: penerapan *profit and loss sharing* berbasis *al-adl* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap menurut kebiasaan masyarakat setempat hanya secara lisan (tidak tertulis) tanpa saksi atas unsur kepercayaan sedangkan waktu berakhirnya perjanjian tidak disebutkan pada saat akad. Ketentuan dalam fiqih muamalah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.. Presentase hasil sudah di tentukan pada saat akad sesuai kontribusi kedua belah pihak, Namun apabila terjadi gagal panen maka akan ditanggung kedua belah pihak. Penerapan *Al-adl* dalam perjanjian kerjasama bagi hasil berdasarkan hak dan kewajiban. Antara pemilik lahan dan penggarap menerapkan keadilan dalam bermuamalah dengan menjalankan kewajibannya sehingga memperoleh hak berupa hasil sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Sehingga dirasa aspek keadilan ini telah sesuai. Selain itu hasil kerjasama pertanian bawang merah telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan petani. Pendapatan yang di peroleh dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

**Kata Kunci:** *Profit and loss sharing, AL-Adl, Kesejahteraan petani.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif yang memberikan pedoman hidup yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia baik dalam bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah dalam kegiatan ekonomi seperti melakukan sebuah perjanjian.<sup>1</sup> Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah semestinya diterapkan secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar umat. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt QS Al-Baqarah: 2/208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”<sup>2</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa apabila ajaran Islam diterapkan secara parsial maka umat Islam akan mengalami kerugian didunia maupun diakhirat. Sebab jika ajaran Islam diwujudkan hanya dalam bentuk ritualisme ibadah semata sementara bidang lainnya seperti ekonomi, politik, perbankan masih kurang

---

<sup>1</sup> Rusnah Muhamad, dkk. “Corporate Social Responsibility An Islamic Perspective” *Jurnal Of Accounting Perspectives*, Vol 1, (2008), h. 44.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung, Al Cordoba,. 2010), h. 32.

diterapkan, maka umat Islam telah mengubur ajaran Islam dengan tangannya sendiri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, iklim tropis menjadikan lahan pertanian menjadi subur sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi baik kontribusi negara maupun kontribusi dunia.<sup>3</sup> Lahan pertanian yang subur menyebabkan sebagian besar penduduk bekerja dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian seperti pada daerah pedesaan yang hampir semua penduduknya berprofesi sebagai petani.<sup>4</sup> Data BPS juga menunjukkan jumlah keluarga tani di Indonesia sekitar 26,13 juta jiwa.<sup>5</sup>

Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat berperan sebagai sumber penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga dan sumber devisa bagi negara. Holtikultura merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi PDB. Dimana rata-rata PDB subsektor holtikultura selama lima tahun terakhir (2012-2017) yaitu sebesar 123.514.04 miliar rupiah (BPS 2017).<sup>6</sup> Bawang merah sebagai tanaman holtikultural yang menjadi salah satu

---

<sup>3</sup> Jefri Putri Nugraha, "Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternative Pembiayaan Pertanian Di Indonesia" *Jurnal Iqtishodia*, Vol 1, No. 2, (2016), h. 81.

<sup>4</sup> Zubaidah Nasution, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian" *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*, Vol 1, No. 1 (2016), h. 2.

<sup>5</sup> Unggul Priyadi, dkk "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta", *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1, (2015), h. 103.

<sup>6</sup> Ivony Annisa, "Efisiensi Pemasaran Bawang Merah Provinsi Jawa Tengah" *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol 8, No. 2, (2018), h. 254.

komoditas utama yang ditetapkan oleh kementerian pertanian dimana memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Holtikultura (DJH) mengemukakan bahwa produksi bawang merah di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yaitu sampai 1.010.773,00 ton (bps 2013). Seiring dengan hal tersebut kebutuhan bawang merah di Indonesia sebagai penyedap masakan mengalami peningkatan.<sup>7</sup> Namun besarnya jumlah penduduk yang menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat petani masih tinggi, Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia sangat mempengaruhi sektor lahan dimana jumlah lahan terus menyusut.<sup>8</sup> Lahan-lahan pertanian yang awalnya sebagai tempat untuk bercocok tanam berubah menjadi area pemukiman masyarakat.<sup>9</sup> Hal tersebut mengakibatkan penguasaan lahan menurun dan petani yang tidak memiliki lahan meningkat.<sup>10</sup>

Kerjasama pertanian dalam Islam disebut dengan tiga istilah yakni *muzara'ah*, *mudharabah* dan *musaqah*.<sup>11</sup> *Musaqah* berasal dari kata *as-saqa*. Kata *as-saqa* digunakan karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi

---

<sup>7</sup> Mayun Karina Dewi, dkk "Pengaruh Tingkat Produksi, Harga, Dan Konsumsi Terhadap Impor Bawang Merah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 5, No. 1, (2016), h. 121.

<sup>8</sup> Umrotul Khasanah, "The Practice Of Profit and Loss Sharing System For Rice Farms in East Java, Indonesia" *Jurnal Of Business and Management*, Vol 9, No 3,(2013), h. 1.

<sup>9</sup> Beni Septytan Primada, Dkk "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah Studi Desa Temu Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Jestt*, Vol. 2, No. 11, (2015), h. 955.

<sup>10</sup> Unggul Priyadi, dkk "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta", *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1, (2015), h. 103.

<sup>11</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14.

(penyiraman), maksudnya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana tanaman sudah ada. Tetapi memerlukan tenaga penggarap untuk merawat.<sup>12</sup> *Muzara'ah* merupakan suatu akad perjanjian kerja sama pada pengolahan lahan pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan kesepakatan imbalan dari hasil setelah panen.<sup>13</sup> Dalam sistem seperti ini benih dan lahan disediakan oleh pemilik lahan dan si penggarap hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.<sup>14</sup> Sistem *muzara'ah* mengacu pada prinsip *profit and loss sharing* sistem dimana hasil akhir yang menjadi patokan, jika pertaniannya mengalami keuntungan maka hasilnya akan dibagi dua namun, begitupun sebaliknya jika pertanian tersebut terjadi kerugian maka akan ditanggung kedua pihak.<sup>15</sup>

Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam sebab kerjasama pertanian dapat memberikan hasil dan manfaat yang besar. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. An-An'am:6/99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

<sup>12</sup> Emily Nur Saidy, dan Ilman “Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli” *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019), h. 22.

<sup>13</sup> Beni Septytan Primada, Dkk “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah Studi Desa Temu Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Jestt*, Vol. 2, No. 11, (2015), h. 959.

<sup>14</sup> Dahrum dan Rahmawati Muin, “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tumpang Sema (Akad *Muzara'ah*) Bagi Hasil Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Toppobulu Kabupaten Gowa, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 2, No. 2 (2016), h. 3.

<sup>15</sup> Muhammad Rafly, dkk “*Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal hukum islam*, Vol. 11, No. 2, (2016), h. 222.



أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ<sup>١٦</sup> أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ<sup>ج</sup>

إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahannya:

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.<sup>16</sup>

Kesejahteraan merupakan aspek penting dari kualitas hidup manusia.

Peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga.<sup>17</sup> Kesejahteraan dapat di ukur dari terpenuhinya standar kebutuhan, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, pendidikan, dan spiritual. Manusia adalah makhluk sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan mampu menyelesaikan atau memperoleh tanpa bantuan orang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang membutuhkan mitra dalam melakukan sesuatu salah satunya kerjasama pertanian dimana seseorang yang memiliki lahan dan modal namun tidak memiliki keahlian untuk mengolah lahan sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk menggarap lahan tersebut agar dapat menghasilkan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung, Al Cordoba, 2010), h. 140

<sup>17</sup> Emily Nur Saidy dan Ilman “Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli” *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019), h. 17.

<sup>18</sup> Amirus sodiq, “Konsep kesejahteraan dalam Islam” *Jurnal Equilibrium*, Vol 3, No. 2 (2015), h. 381.

Kerjasama perjanjian pengolahan lahan pertanian biasanya dilakukan oleh masyarakat di pedesaan pada umumnya, hal tersebut dilatarbelakangi minimnya lapangan kerja serta keahlian lain selain menjadi seorang petani serta didukung oleh lahan pertanian yang cukup luas, disamping itu kerjasama tersebut dilakukan atas kemauan kedua pihak pemilik lahan dan penggarap dimana bentuk kerjasama seperti ini selain memberikan keuntungan kedua pihak juga untuk mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka, sehingga dalam Islam menganjurkan bentuk kerja sama seperti ini.<sup>19</sup> Walaupun di Indonesia istilah bagi hasil dalam bidang pertanian memiliki nama yang berbeda-beda pada setiap daerah namun bagi hasil ialah hukum atau kebiasaan masyarakat setempat yang bertujuan menolong sesama masyarakat.<sup>20</sup> Selain itu dengan adanya kerjasama tersebut penggarap lahan dapat memperoleh penghasilan sehingga dapat memberikan nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya yang akhirnya dapat mencapai kesejahteraan.

Bawang merah merupakan tanaman yang banyak diusahakan oleh masyarakat petani di Kabupaten Enrekang Kec Anggeraja. Data BPS (2018) Dinas pertanian dan perkebunan juga menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Kabupaten Enrekang khususnya kecamatan Anggeraja dengan jenis tanaman bawang merah ialah 7.612 Ha dengan jumlah produksi mencapai 837.300.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tri Wahyuningsih, "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat" *Jurnal Komunitas*, Vol 3, No. 2 (2011), h. 199.

<sup>20</sup> Jhonny Akbar, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah "Mattesan Uma Membangun Konsep Bagi Hasil Pertanian Berbasis Keadilan Dan Kemashlahatan" *Jurnal KNAPPPTMA Ke-6*, Vol 6, No 3, (2017), h. 92.

<sup>21</sup> Dinas pertanian dan perkebunan kabupaten enrekang kecamatan anggeraja dalam angka tahun 2018.

Perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan antara pihak pemilik lahan dan penggarap lahan yang pada umumnya dilakukan mengikuti kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat dengan perjanjian secara lisan adapun pembagian hasil sesuai kebiasaan masyarakat petani, dimana dalam pembagian keuntungan dari kerjasama lahan pertanian diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan presentase yang sudah turun temurun digunakan, presentase bagi hasil tersebut di sepakati pada saat akad.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang kerjasama bagi hasil pertanian yang seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan sebab kemungkinan besar terjadi diskriminasi dari pihak pemilik lahan terhadap pihak penggarap yang berada di posisi lemah karena sangat tergantung kepada pemilik lahan dimana tidak dapat menuntut karena tidak adanya bukti yang kuat. Begitupun sebaliknya apabila terjadi manipulasi yang bisa dilakukan penggarap. Selain itu kebiasaan masyarakat petani Kecamatan Anggeraja melakukan kerjasama bagi hasil tanpa menetapkan batas waktu perjanjian, perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktu dan hendaklah dituliskan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Sementara seperti yang diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Anggeraja menggantungkan hidupnya pada kerjasama pertanian yang melibatkan penggarap lahan dan pemilik lahan, sehingga kerjasama perlu dilandasi dengan prinsip

keadilan, kejujuran dan kepercayaan untuk peningkatan kualitas hidup kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik dengan mengambil judul **“Implementasi *Profit and Loss Sharing* Berbasis Al-Adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”**.

### ***B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi kepada penelitian yang akan dilakukan agar kedepannya dapat meringankan bagi peneliti sebelum turun atau melakukan sebuah observasi atau pengamatan serta memberi batasan agar penelitian yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan judul dan yang diharapkan penulis. Penelitian ini dilakukan dengan titik fokus pada penerapam bagi hasil *profit and loss sharing* berbasis Al-Adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk menyusun dan menganalisa yang akan ditulis oleh peneliti, maka peneliti perlu mengemukakan deskripsi focus yang berkaitan dengan implementasi *profit and loss sharing* berbasis Al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Melakukan perjanjian dalam ajaran Islam diatur sedemikian rupa, salah satu perjanjian yang sering dilakukan dalam kegiatan ekonomi baik dalam bisnis ataupun kegiatan kerjasama lahan pertanian adalah perjanjian *profit and loss sharing*. Dimana dalam perjanjian tersebut dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan pembagian untung dan rugi setelah adanya hasil dari sesuatu yang diusahakan. Dengan adanya perjanjian kerjasama pada lahan pertanian dengan

menggunakan sistem *profit and loss sharing* sangat membantu masyarakat yang ingin bercocok tanam dan memiliki keahlian namun tidak mempunyai lahan serta masyarakat yang memiliki lahan namun tidak mempunyai keahlian untuk mengolah sehingga besar kemungkinan akan terjadi peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat khususnya para petani.

*Profit and loss sharing* atau pembagian untung dan rugi merupakan sebuah perjanjian kontrak antara dua belah pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Seperti halnya perjanjian kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan dimana pemilik lahan memberikan modal dan penggarap memberikan tenaga, keahlian dan waktu.

*Al-Adl* (keadilan) sebagai istilah yang berarti kesetaraan atau keseimbangan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan tolong menolong, kasih sayang dan tanggung jawab antar sesama.

Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat. Untuk mengukur kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran sehingga masyarakat tersebut bisa dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator kesejahteraan meliputi : 1) Pendapatan dimana pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh dari suatu usaha tertentu yang biasanya akan dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, kesehatan maupun pendidikan. 2) Konsumsi pengeluaran, pola konsumsi dijadikan salah satu indikator kesejahteraan karena besar kecilnya proporsi

pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran dalam keluarga dapat menjadi gambaran kesejahteraan terhadap keluarga tersebut. 3) pendidikan. 4) Perumahan Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat belindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang bisa dikatakan sejahtera adalah memiliki luas 10m. Dengan status kepemilikan milik pribadi. 5) Kesehatan jadi kesehatan adalah kesejahteraan dari tubuh indicator kesehatan diantaranya kemampuan dalam pemenuhan pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum, sandang yaitu untuk keperluan pakaian, sandal dll, kesehatan dalam hal penyediaan ongkos untuk biaya ke dokter, perawatan dan obat-obatan

Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, akan tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan dalam Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Tabel 1.1**

**Fokus penelitian dan Deskripsi fokus**

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Profit and Loss Sharing	- Kerjasama dua belah pihak - Pembagian untung dan rugi
2.	Konsep Al-Adl (Keadilan)	- Hak-hak - Kewajiban
3.	Kerjasama Pertanian	- Akad Musaqah

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akad mudharabah</li> <li>- Akad Muzara'ah</li> </ul>
4.	Konsep Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendapatan</li> <li>- Kesehatan</li> <li>- Tingkat pendidikan</li> <li>- Tingkat perumahan</li> </ul>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *profit and loss sharing* yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana *profit and loss sharing* dalam konsep *Al-adl* yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ?
3. Bagaimana *profit and loss sharing* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?

### D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat yang kemudian akan dijadikan perbandingan atau sebagai bahan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil penelitian terdahulu Mengenai sistem bagi hasil. Hal tersebut dianggap sebagai langkah untuk mengkaji penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian di jadikan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah oleh si penulis, selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Untuk bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan di tempuh penulis.

1. Achamd Otong Busthomi, dkk dalam jurnal Akad *muzara'ah* pertanian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *muzara'ah* pertanian padi di desa Gebang Kulon Cirebon dengan istilah maro. Dalam kesepakatan tersebut bagi hasil dilakukan dengan rasio 1/2. Hasil tersebut dibagi rata antara pemilik dan penggarap dengan lahan, bibit, pupuk, dan biaya prouksi berasal dari pemilik lahan. Sedangkan alat, tenaga dan biaya operasional penggarapan mengikuti petani penggarap. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah pelaksanaan kerjasama tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi syariah. Hal itu dilihat berdasarkan rukun dan syarat yang di terapkan kedua pihak yang melakukan kerjasama.<sup>22</sup>

Adapun persamaan dari penelitian tersebut yaitu membahas mengenai kerjasama pertanian, namun terdapat perbedaan dimana penelitian selanjutnya mengkaitkan bagaimana penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Dahrum dan Rahmawati Muin dalam jurnal penerapan sistem *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Palampang kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem *muzara'ah* yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Achmad Otong Busthomi, dkk “Akad *Muzara'ah* Pertanian Dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol, 3, No. 2 (2018).



masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam islam, namun mereka hanya memakai kebiasaan adat setempat dimana mereka tidak menentukan jangka aktu berlakunya akad muzara'ah serta pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak..<sup>23</sup> Adapun persamaan penelitian yaitu membahas dan meneliti tentang kerjasama pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan, Sedangkan perbedaan penelitian dimana peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan dan peneliti selanjutnya akan meneliti penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Muhammad Rafly, dalam jurnal "*Muzara'ah* (perjanjian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum Islam" mengemukakan bahwa pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami kegagalan total, pemilik tanah memberikan semua hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal

---

<sup>23</sup> Dahrum, Dan Rahmawati muin "Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba" *Jurnal Iqtisaduna* Vol, 5 No. 2, (2016).

inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau resiko ditanggung bersama-sama.<sup>24</sup> Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai kerja sama pada lahan pertanian dengan menggunakan akad muzara'ah, Namun disamping itu terdapat perbedaan dari penelitian dimana peneliti selanjutnya akan mengembangkan penelitian tentang kerja sama dalam pertanian yang dengan penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

4. Unggul Priyadi dkk dalam jurnal dengan judul Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah studi kasus di kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah "*maro*" ( $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang

---

<sup>24</sup> Muhammad Rafly, dkk "*Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*", *Jurnal hukum islam*, Vol. 11, No. 2, (2016), h. 228.

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.<sup>25</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan ialah mengenai penerapan bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian yang kemudian dikaitkan dengan *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukharabah*. Namun, juga terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya dimana peneliti selanjutnya akan meneliti bukan hanya mengenai penerapan bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan akad muzara'ah akan tetapi melihat bagaimana penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

5. Tri Wahyuningsih dalam jurnal judul Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan adalah menggunakan sistem maro yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya meningkatkan perekonomian akan tetapi juga dapat memupuk solidaritas dalam masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kepedulian antar pemilik dan penggarap dengan saling membantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan.<sup>26</sup> Persamaan dari penelitian tersebut ialah

---

<sup>25</sup> Unggul Priyadi, dkk “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1, (2015).

<sup>26</sup> Tri Wahyuningsih, “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat” *Jurnal Komunitas*, Vol 3, No. 2 (2011).

penelitian membahas tentang Bagi hasil dalam kerjasama lahan pertanian, Namun adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dimana peneliti selanjutnya akan melihat bagaimana penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

6. Dias Rizqi Mardani dan Siti Inayahtul Faizah dalam jurnal Kesejahteraan petani penggarap sawah pada akad muzara'ah dengan pendekatan Maqashid syariah di Tulungagung. Hasil penelitian kerja sama pertanian yang dilakukan oleh petani dan penggarap sawah menggunakan akad muzara'ah dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan kehidupan sehari-hari bagi petani.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang kerjasama pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Namun terdapat pula perbedaan penelitian dimana peneliti akan meneliti penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

7. Fauzi Almubarak dalam jurnal keadilan dalam perspektif Islam. Hasil penelitian Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, sosial dan politik. Asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah, "Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung" jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan, Vol 6, No 7 (2019).

<sup>28</sup> Fauzi Almubarak "Keadilan dalam Islam" Jurnal Istighna, Vol 1, No. 2 (2018).

Persamaan penelitian ialah membahas tentang al-adl atau keadilan. Namun perbedaan penelitian dimana peneliti akan meneliti al-adl dari segi kerjasama bagi hasil pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

8. Fahrurrozi dalam jurnal penelitian Konsep perjanjian *Profit and loss sharing* Dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian Kerjasama *profit and loss sharing* antara pemilik modal dan pelaksana usaha merupakan langkah tepat, sebagaimana yang sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan seorang pelaku usaha wanita bernama Siti Khadijah. Adapun caranya, Khadijah menyerahkan modal berupa barang dagangan untuk dibawa Muhammad berniaga antara negeri Makkah dengan Sham (Syiria).

*Profit and loss sharing* merupakan perjanjian atas suatu jenis kerjasama di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pelaku usaha (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dimana landasan perjanjian *profit and loss sharing* berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI.<sup>29</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut ialah penelitian membahas tentang prinsip *profit and loss sharing* dalam perjanjian kerjasama. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dimana

---

<sup>29</sup> Fahrurrozi, "Konsep Perjanjian *Profit and Loss Sharing* Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3, No. 2 (2016), h. 323.

peneliti akan melihat bagaimana penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani..

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, Adapun tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui penerapan *profit and loss sharing* berbasis al-adl yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
3. Untuk mengetahui *profit and loss sharing* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

#### ***F. Manfaat***

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji tentang penerapan pembagian untung dan rugi berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani, merujuk pada tujuan maka peneliti ini dibingkai dengan konsep *profit and loss sharing*, *Al-adl* dan konsep kesejahteraan, yang dimana untuk

mengukur keadilan dalam kerjasama pertanian dapat dilihat dari keadilan dari segi pembagian untung dan rugi serta keadilan dari kontrak perjanjian. Sedangkan pada tingkat kesejahteraan ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif adalah pendekatan dengan menghitung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial. sedangkan pendekatan subyektif ialah pendekatan melalui persepsi masyarakat tentang aspek kesejahteraan dengan mengukur tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan masyarakat.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan kepada pembaca :

Adapun untuk pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi masyarakat khususnya petani, Penelitian ini dapat dijadikan perhatian khususnya bagi petani yang diharapkan mampu menerapkan perjanjian kerjasama serta pembagian hasil dan rugi secara adil antar kedua belah pihak. Dengan penerapan pembagian hasil dan rugi secara adil akan menciptakan eksternalitas positif dari kegiatan pertanian berupa peningkatan pendapatan guna menciptakan kesejahteraan antar kedua pihak.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktek kerjasama pengolahan lahan dengan sistem pembagian untung dan rugi berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan

## BAB II

### TIJAUAN TEORETIS

#### A. *Konsep Profit and loss sharing*

*Profit sharing* berasal dari bahasa asing (Inggris) yang secara terminologi ialah Bagi hasil. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya pecah, penggal dari yang utuh. Sedangkan hasil merupakan akibat dari tindakan baik yang menguntungkan ataupun merugikan.<sup>30</sup>

Dalam kamus ekonomi *profit sharing* diartikan pembagian laba dan distribusi beberapa bagian dari laba. Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip bagi hasil merupakan hubungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk usaha-usaha seperti perjanjian pengolahan lahan antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>31</sup> Pendapatan (*profit*) sebagai hasil dari pemberian lahan dan modal untuk pengolahan lahan sesuai yang di sepakati diawal kontrak.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Emily Nur Saidy dan Ilman “Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli” *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019), h. 19.

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2011) h. 95.

<sup>32</sup> Faqih Nabhan, “*Profit and loss sharing* Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi” *Jurnal Muqtasid*, Vol 1, No. 2 (2010), h. 286.



Namun pembagian tidak hanya ketika memperoleh keuntungan, tetapi juga pada saat mengalami kerugian maka disebutlah sebagai perjanjian *profit and loss sharing*.<sup>33</sup>

*Loss sharing* merupakan pembagian kerugian dimana apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

Dalam Islam sistem bagi hasil mengarahkan pada pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) yang proporsional dan jelas.<sup>34</sup> Secara umum dalam ekonomi Islam prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad diantaranya, *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *musaqoh*. Namun, yang secara khusus dalam pertanian ialah akad *Muzara'ah* dan *Musaqoh*.

Bagi hasil dalam bidang pertanian merupakan suatu perjanjian kerja sama dalam usaha serta diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akad didapat antara kedua pihak yaitu penggarap dan pemilik tanah. Dimana penggarap ialah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah namun tidak memiliki tanah.<sup>35</sup> Adapun perhitungan bagi hasil dalam ekonomi Islam yang diterapkan ada tiga model sistem yaitu *profit and loss sharing*, *profit sharing*, dan *revenue sharing*.

---

<sup>33</sup> Fahrurrozi, "Konsep Perjanjian *Profit and Loss Sharing* Dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3, No. 2 (2016), h. 313.

<sup>34</sup> Andi Sri Wahyuni, "Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Istiadat" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4, No. 3 (2013), h. 468.

<sup>35</sup> Dahrum dan Rahmawati Muin. "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tumpang (Akad *Muzara'ah*) Bagi Hasil Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 2, No. 2 (2016), h. 5.

*Prinsip revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang dihitung berdasarkan kepada berapa total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>36</sup>

Prinsip *Profit and Loss Sharing* pada akad *muzara'ah*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Apabila hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.<sup>37</sup>

Keuntungan yang dapat di peroleh dari kerja sama usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.<sup>38</sup> Kemudian apabila terjadi kerugian atas kerja sama yang dilakukan antara pemilik dan penggarap ada dua perlakuan, pertama apabila kerugian terjadi karena kesalahan penggarap dalam mengelola tanah dan modal yang diberikan pemilik tanah maka kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh penggarap. Kedua apabila kerugian terjadi karena kondisi ekonomi dan faktor alam atau kejadian luar biasa yang terjadi di luar kekuasaan si

---

<sup>36</sup> Wika Ramdhani Hafid, "Penerapan Prinsip *Profit* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah" *Jurnal Al-Mashrafiyah*, Vol 2, No. 1, (2018), h. 70.

<sup>37</sup> Muhammad Rafly, dkk "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", *Jurnal hukum islam*, Vol. 11, No. 2, (2016), h. 222.

<sup>38</sup> Wika Ramdhani Hafid, dkk "Penerepan Prinsip *Profit Sharing* and *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar" *Jurnal Al-Mashrafiyah*, Vol 2, No. 1, (2018), h. 69.

penggarap dan tidak terjadi karena kesalahan dalam mengelola modal, maka kerugian ditanggung kedua pihak.<sup>39</sup>

Pembagian hasil panen menurut pengikut Mazhab Hanafi dan Hanbali, presentase keuntungan hasil pertanian harus disepakati pada saat melakukan perjanjian. Penentuan jumlah yang pasti akan diterima oleh pemilik lahan dan penggarap diperbolehkan, Setiap pihak dapat mendapatkan hasil sesuai dengan kontribusinya. Menurut pendapat mazhab Syafi'i pembagian tidak perlu ditentukan pada saat perjanjian, sebab setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara modal yang sudah diberikan dan tingkat keuntungan dari hasil panen. Dalam hal ini pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan adanya perbedaan perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi modal yang disertakan dalam perjanjian.<sup>40</sup>

## **B. Ketentuan Perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960**

Perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disebutkan dalam pasal 1 huruf c bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan antara pemilik lahan dan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Bentuk perjanjian bagi hasil dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil disebutkan mengenai bentuk perjanjian bagi hasil dalam

<sup>39</sup> Fqih Nabhan, "*Profit and loss sharing* Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi" *Jurnal Muqtasid*, Vol 1, No. 2 (2010), h. 286.

<sup>40</sup> Dahrum dan Thamrin Logawali "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba" *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 2, No. 2 (2016), h. 9.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi hasil Pertanian.

pasal 3 yaitu : 1) semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan aparat desa setempat dengan disaksikan oleh saksi masing-masing dari pihak pemilik lahan dan penggarap. 2) Perjanjian bagi hasil yang termuat dalam ayat 1 memerlukan pengesahan dari kepala kecamatan.

Hak dan kewajiban pemilik dan penggarap. Hak pemilik : 1) Bagian hasil yang di tetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap. 2) Menerima kembali tanahnya dari penggarap apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil telah berakhir. Kewajiban pemilik : 1) Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk diusahakan atau dikerjakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut. Hak dan kewajiban penggarap : 1) Hak penggarap, selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan. 2) Kewajiban penggarap, menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dalam keadaan baik.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah, dan bagi tanah kering 5 tahun. Dengan ditetapkannya jangka waktu perjanjian maka diharapkan akan teripta rasa aman bagi penggarap, karena kadang timbul sikap sewenang-wenang dari pihak pemilik lahan yang memutuskan perjanjian bagi hasil padahal bagi hasil itu baru berjalan selama 2 tahun.

Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil : 1) 1 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanami di sawah. 2) 2/3 bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di tanam di lahan kering. Hasil bersih yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus di pikul bersama seperti benih, pupuk, biaya tanaman, biaya panen dll.

Pemutusan perjanjian bagi hasil : 1) atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada kepala Desa. 2) Seijin Kepala Desa atas tuntutan pemilik lahan apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya. Kepala Desa memberikan izin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil.

### **C. Makna *Al-Adl* Dalam Hukum Islam**

Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam, *Al-adl* dalam bahasa Indonesia beralih menjadi kata adil yang digunakan dalam bentuk kata benda keadilan dengan makna yang sama. *Al-adl* dalam kamus lisan al-Arab diartikan dengan sesuatu yang lurus, menyamakan sesuatu dengan yang lain.<sup>42</sup> Dalam Islam keadilan merupakan asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Adil (*Al-adhlu*) yang harus di contoh oleh hambanya.

Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk menegakkan kebenaran kepada siapapun. Secara etimologis adil berarti tidak berat sebelah maksudnya tidak memihak. Secara terminologis adil berarti

---

<sup>42</sup> M. Suryadinata "Al-Adl dalam perspektif Al-Qur'an" *Jurnal refleksi*, Vol II, No. 1, (2000), h. 32.

mempersamakan sesuatu dengan yang lain sehingga sesuatu itu tidak berbeda satu dengan yang lain. Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat/kelompok, individu dengan otoritas kekuasaan/negara, individu dengan alam semesta. Menurut Rohi Baalbaki Al-adl diterjemahkan kedalam bahasa Inggris berarti *justice, equitability, impartiality* atau *unbiasedness*. “Justice” artinya Keadilan dalam bahasa Latin “*iustitia*” kata *ius* berarti hak. Jadi dengan demikian “*iustitia*” ada dua makna yakni hak pribadi dan hak orang lain.<sup>43</sup> Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia.<sup>44</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo dalam jurnal yang ditulis oleh Sulhani Hermawan dengan judul Tinjauan keadilan sosial terhadap hukum tata pangan Indonesia beliau mendefinisikan tentang keadilan diantaranya : (1) Memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima. (2) Memberikan setiap orang yang menurut aturan hukum adalah haknya. (3) Kebajikan memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya. (4) Memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan seseorang. (5) Persamaan pribadi. (6) Pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran.<sup>45</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antara Allah SWT dengan makhluknya dan juga hubungan antara sesama makhluk. Dalam aturan hubungan-hubungan tersebut Islam

---

<sup>43</sup> Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Law and Justice*, Vol 2, No. 1 (2017), h. 14.

<sup>44</sup> Ahmad affan ghafar dan Jumadi purwodjomo “Pemanfaatan barang gadai dalam perjanjian hutang dibawah tangan” *Jurnal Notarius*, Vol 12, No.1 (2019), h. 489.

<sup>45</sup> Sulhani Hermawan, “Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, No. 3 (2012), h. 492.

memerintahkannya kepada setiap manusia untuk menegakkan keadilan pada setiap tindak dan perbuatan yang dilakukan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agama, keselamatan dirinya, keselamatan hartanya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah dengan tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nahl: 16/90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah berbuat adil bersifat umum yang mengintruksikan kepada manusia untuk berbuat adil terhadap sesama makhluk. Allah swt melarang perbuatan keji serta permusuhan.<sup>47</sup>

Berlaku adil terkait dengan hak dan kewajiban, keadilan biasa dimaknakan dengan memberikan hak kepada yang berhak (*yu'thi alhaqq haqqahu*) atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadhu assyai ala maudhi'ih*). Menurut Syed Muhammad Naquib Al-attas secara bahasa keadilan pada umumnya adalah tentang

<sup>46</sup> Fauzi Almubarak "Keadilan Dalam Perspektif Islam" Junral Istighna, Vol 1, No.2, (2018), h. 115.

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al-Cordoba, 2010), h. 277.

pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi suatu benda atau manusia, kebenaran yang menentang kesalahan, cara atau batasan dan kebenaran terhadap kepalsuan.<sup>48</sup> Islam mengajarkan keadilan hampir dalam setiap aspek kehidupan keadilan dalam hak-hak manusia, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan dan keadilan dalam bermuamalah baik transaksi maupun kerjasama, keadilan dapat terwujud jika dilakukan atas dasar sama-sama rela artinya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga dengan adanya penegakkan keadilan akan tercapai kesejahteraan antar kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.<sup>49</sup> Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>50</sup>

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa sebagai orang yang beriman, manusia apalagi umat Islam tidak boleh menggunakan sesuatu yang bukan menjadi haknya.

<sup>48</sup> M.Roem Syibly, "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah" *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1, (2015), h. 82.

<sup>49</sup> Firman setiawan, "Kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep Madura" *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, No. 2 (2019), H. 321.

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung Al-Cordoba, 2010), h. 29.



Keadilan ekonomi mengandung pengertian bahwa Al-Quran sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianism*) dan menghindari segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi seperti, eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain sebagainya. Dalam Islam keadilan ekonomi pada dasarnya ialah konsekuensi dari konsep persaudaraan Islam. Keadilan ekonomi setiap individu ialah mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikan.<sup>51</sup>

Adapun prinsip yang melandasi praktik keadilan ekonomi Islam dalam hal muamalah atau kegiatan kerjasama bagi hasil ialah mengarahkan para pelaku usaha menjalankan kewajibannya agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, pelaku usaha dituntut untuk berlaku adil dan tidak berbuat dzalim dalam hal ini melakukan kerjasama dengan membagi resiko bersama (*risk sharing*). Disamping itu pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan dirinya. Seseorang yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembagian usaha, mustahil usahanya akan berkembang. Jadi keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem bagi hasil.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa: 4/58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>51</sup> M.Roem Syibly, "Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah" *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1, (2015), h. 87.

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.<sup>52</sup>

Ayat diatas menjelaskan begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah swt memperingatkan kepada orang-orang yang beriman jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi berbuat adil.<sup>53</sup>

Keadilan sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim untuk menegakkannya baik individu maupun masyarakat dengan tujuan menciptakan keseimbangan dalam semua lini kehidupan sehingga memungkinkan semua individu atau masyarakat mendapatkan hak dan tanggung jawabnya.<sup>54</sup> Pada dasarnya ekonomi Islam berdiri tegas pada azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan, penegakkan keadilan dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*), dan saling tolong menolong (*ta'awun*) baik antara si kaya dan si miskin ataupun antara penguasa dengan rakyat.

#### **D. Akad Kerjasama pertanian Dalam Islam**

Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi dari perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan tertulis dan lisan yang dibuat oleh

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al-Cordoba, 2010), h. 87.

<sup>53</sup> Murtiadi Awaluddin, dkk "Al-adl sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty di Ternate" *Jurnal Al-Amwal*, Vol 5, No. 1 (2020), h. 74.

<sup>54</sup> Fauzi Almobarok "Keadilan Dalam Perpektif Islam" *Jurnal Istighna*, Vol 1, No. 2, (2018), h. 138.

kedua belah pihak atau lebih dimana kedua pihak tersebut sepakat akan melakukan apa yang diperjanjikan itu. Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>55</sup> Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah: 5/1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>56</sup>

Ayat diatas mengandung uraian tentang akad baik secara tegas maupun tersirat. Perintah ayat diatas menunjukkan dalam A-Quran sangat menekankan perlunya memnuhi akad dengan segala bentuk maknanya dengan pemenuhan sempurna serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya.

<sup>55</sup> Ahmad Otong Buthomi, dkk “Akad *Muzara’ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Mustashafa*, Vol 3, No. 2 (2018), h. 272.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung Al Cordoba. 2016), h. 106.

Akad menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli, *ijarah, wakalah, rahn*.<sup>57</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara dan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan definisi tersebut diperoleh tiga unsure yang terkandung dalam akad.<sup>58</sup> 1) Pertalian ijab dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan kehendak dari suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu. *Qabul* merupakan pernyataan untuk menerima atau menyetujui kehendak *mujib*. 2) Dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan dengan hal-hal yang diatur oleh Allah swt dalam Alquran dan hadis, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan melakukan akad serta objek akad. 3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh pihak dan memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak yang melakukan.

Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan apabila terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Adapun Rukun-rukun suatu akad menurut jumhur ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad meliputi:<sup>59</sup> 1) Pihak yang berakad. 2) Sesuatu yang di akadkan (*ma'qud alaihi*). 3) Tujuan akad. 4) Ijab

---

<sup>57</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 46.

<sup>58</sup> Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah" *Jurnal Sulesana*, Vol 12, No. 2 (2018), h. 147.

<sup>59</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 44.

atau yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak. 5) Qabul yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak atau jawaban terhadap ijab.

Pada prinsipnya akad-akad perjanjian syariah seharusnya mengandung asas-asas hukum perikatan Islam yang meliputi: 1). Al-Huriyyah (Kebebasan) asas ini merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi di perjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini di benarkan selama tidak bertentangan dengan syariah Islam. 2) Al-Musawah asas ini merupakan landasan kedua pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 3) Asas keadilan dimana dalam konteks perjanjian yang menekankan pada kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di antara para pihak yang berkontrak. Keadilan proporsional ini diwujudkan dalam bentuk *equal pay for equal work*, yaitu masing-masing pihak akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan kontribusinya. 4) Asas kerelaan Al-Quran dan hadist menekankan bahwa hendaknya transaksi di dasari atas kerelaan dan keridhaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi. 5) Asas kejujuran dan kebenaran. Salah satu unsure etika dalam berbisnis adalah pentingnya kejujuran dan kebenaran, nilai ini seharusnya menjadi landasan. Karena unsure kejujuran dan kebenaran akan menghindarkan pihak-pihak yang berkontrak dari segala bentuk manipulasi dan kecurangan. 5) Asas tertulis perjanjian yang dilakukan seharusnya dituangkan dalam tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pembuktian akibat terjadinya

wanprestasi dari masing-masing pihak sehingga dapat dibuktikan secara yuridis apabila ada bukti tertulis.<sup>60</sup>

. Adapun kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam sebagai berikut :

### 1. Musaqah

Musaqah berasal dari kata As-saqa. Kata As-saqa digunakan karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur-sumur”.<sup>61</sup> Berdasarkan definisi musaqah merupakan kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan imbalan bagi hasil setelah lahan tersebut sudah menghasilkan sesuatu, dengan sistem lahan dan tanaman sudah ada, hanya saja membutuhkan tenaga untuk merawat.<sup>62</sup> Adapun istilah *musaqah* yang dikemukakan oleh ulama fikih adalah akad penyerahan kebun kepada penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya adalah milik kedua pihak antara pemilik kebun dan penggarap. Adapun rukun musaqah meliputi: Aqidain (pemilik dan penggarap), objek (tanaman), *sighat* (ijab qabul), sedangkan syarat dari musaqah meliputi: Aqidain harus ahli dalam mengadakan akad, pemilik tanah menyerahkan pohon atau tanaman kepada penggarap, kejelasan jenis tanaman dan bagian penggarap, jangka waktu yang ditentukan., Hasil dari tanaman akan di bagi dua sesuai kesepakatan pada saat akad.<sup>63</sup> Adapun dasar hukum pelaksanaan akad

<sup>60</sup> Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No. 1, (2016),h. 54.

<sup>61</sup> Emily Nur Saidy dan Ilman “Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli” *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019), h. 22.

<sup>62</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 206

<sup>63</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, ( Duta Media Publishing, 2018), h. 80.

*musaqah* menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah berdasarkan sabda Rasulullah saw:<sup>64</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّ بْنِ شَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ شَمَرٍ أَوْ زَّرَعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian merek akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-buah maupun hasil tanamannya”(HR.Muslim).

Hadist diatas menggambarkan bahwa akad musaqah dibolehkan dan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dimana Rasulullah saw juga melakukan perjanjian kerjasama kepada penduduk Khibar dengan perjanjian bagi hasil.

Menurut ulama Hanafiah bahwa, akad *musaqah* dikatakan selesai apabila waktu yang telah disepakati telah berakhir, meningggalnya salah satu yang melakukan akad seta selesai karena adanya unsur yang melatarbelakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian tersebut.<sup>65</sup>

## 2. Muzara'ah dan Mukharabah

Menurut bahasa, *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah majaz dan makna kedua ialah makna hakiki. Secara etimologi berasal dari kata *Al-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologi *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami, dipelihara dengan imbalan

<sup>64</sup> Abdul Rahman Gazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 109.

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), h. 48.

persentase bagi hasil dari hasil panen.<sup>66</sup> Sedangkan mukharabah adalah bentuk kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua pihak menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya di tanggung oleh penggarap.<sup>67</sup> Akad *muzara'ah* dan *mukharabah* merupakan model kerjasama pertanian namun yang membedakan hanya pada benihnya, dimana pada akad *muzara'ah* biaya dan benihnya di tanggung oleh si pemilik lahan sedangkan pada akad *mukharabah* biaya dan benihnya ditanggung oleh penggarap lahan. Adapun istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama yang memiliki makna yang berbeda-beda sebagai berikut :<sup>68</sup> Menurut Hanafiyah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabillah *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja di beri bibit. Makna Muzara'ah menurut mazhab Sayafi'I ada dua pertama, diperbolehkannya bermuamalah atas pohon kurma, artinya lahan yang ditanami pohon kurmakemudian pemilik lahan menyerahkan kebun tersebut kepada penggarap penggarap untuk di rawat dengan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Kedua, Muzara'ah tidak sah apabila pemilik menyerahkan tanah kosong kepada petani kemudian tanah tersebut

---

<sup>66</sup> Dahrum dan Rahmawati Muin "Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba" *Jurnal Iqtisaduna* Vol, 5 No. 2, (2016), h. 3.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 117.

<sup>68</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 153.



ditanami tanaman baru. Sedangkan Menurut malikiyah *muzara'ah* ialah perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap.<sup>69</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat di pahami bahwa *muzara'ah* yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola.

Dalam kaidah fikih Islam *al-muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih.. Secara bahasa, *muzara'ah* berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan.<sup>70</sup>

Adapun dasar hukum akad *Muzara'ah* dan *mukharabah* yaitu mubah (boleh). Syarat dan rukun akad *mukharabah* hampir serupa dengan akad *muzara'ah* begitupun dalil-dalil yang mengikat.. Sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah telah memberikan kepada manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha. Allah swt juga telah menyediakan bumi untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah swt dalam QS Al-Mulk: 29/15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

<sup>69</sup> Dini Syahadatina, "Implemnetasi Paron di Desa Guluk-guluk Dalam Tinjauan Fikih Empat Mazhab

<sup>70</sup> Jefri Putri Nugraha, "Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia" *Jurnal Iqtishodiah*, Vol 1 No. 2 (2016), h. 86.

Terjemahannya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>71</sup>

Islam tidak memperkenalkan adanya penguasaan sumber daya yang ada di muka bumi untuk golongan tertentu melainkan Allah swt telah menyediakan bumi untuk dikelola secara adil dan bijaksana serta sebagai solusi umatnya untuk saling tolong menolong dalam menghadapi ketimpangan akses sumber daya, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah:2/267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>72</sup>

Rasulullah s.a.w.bersabda sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلٌ أَحْلَ خَيْرَ  
بَشَطِرٍ أَوْزَعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

<sup>71</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al Cordoba. 2016), h. 563.

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al Cordoba. 2016), h. 45.

Artinya :”Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa di perbolehkannya akad *muzara’ah* dengan upah tertentu dari buah-buahan dan tanamannya. Menurut zhahir hadis ini, bahwa tidak ada syarat bahwa benih harus disediakan oleh pemilik tanah, dan inilah pendapat yang benar, yang berbeda dengan yang masyhur dari mazhabnya yang men syaratkan benih dari pemilik tanah.<sup>73</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa menolak tanahnya secara *muzara’ah* dengan rasio bagi hasil 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/2. Maka Rasulullah Saw pun bersabda :<sup>74</sup>

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْ عَنْهَا فَلْيَزْرَعْ عَنْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”(Hadits Riwayat Bukhari).

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa akad *muzara’ah* bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Dalam keadaan pemilik lahan tidak dapat mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak

<sup>73</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 151.

<sup>74</sup> Achmad Otong Busthomi, dkk “Akad *Muzara’ah* Pertanian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol, 3, No. 2 (2018), h. 275.

mempunyai lahan pertanian. mereka berdua dapat bekerja sama untuk menolah lahan pertanian atas dasar bagi hasil.<sup>75</sup>

DSN-MUI juga telah menetapkan fatwa-fatwa terkait dengan akad kerja sama. Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.<sup>76</sup>

Adapun ketentuan nisbah bagi hasil dan kerugian menurut DSN-MUI:<sup>77</sup>

- a. Keuntungan usaha kerja sama harus dihitung jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian perjanjian.
- b. Seluruh keuntungan usaha harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk mitra tertentu.
- c. Salah satu mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Keuntungan usaha boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.

<sup>75</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 220.

<sup>76</sup> <http://alminist.blogspot.com/2010/08/fatwa-dsn-mui.html>.

<sup>77</sup> <http://alminist.blogspot.com/2010/08/fatwa-dsn-mui.html>.

- e. Kerugian usaha kerja sama wajib ditanggung para mitra secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakan.

Dalam hukum Islam terbentuknya suatu akad perjanjian yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat akad. Adapun rukun dan syarat akad *muzara'ah* dikemukakan oleh jumhur ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah*, harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzara'ah* menurut Jumhur Ulama adalah:<sup>78</sup> Adanya pemilik lahan, Petani penggarap, Objek *muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani serta adanya *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak memerlukan *qabul* secara lafadz, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qabul. Sifat akad *muzara'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara'ah* dan harus menggunakan *sighat*.

Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat akad *muzara'ah*:<sup>79</sup> 1) Syarat yang bertalian dengan aqidain yaitu harus berakal karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum, 2) Syarat yang berkaitan dengan

---

<sup>78</sup> Dahrum dan Rahmawati Muin "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistim Tesang (*Akad Muzara'ah*) Bagi Hasil Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 2, No. 2 (2016), h. 7.

<sup>79</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 158.

tanaman, yaitu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan 3) Hal yang berkaitan dengan hasil dari tanaman yaitu Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), 4) Hasil adalah milik bersama, 5) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, 6) Tidak disyaratkan bagi salah satu pihak penambahan yang maklum, 7) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya, 8) Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah, 9) Hal yang berkaitan dengan waktu, jangka waktu harus jelas dalam akad.<sup>80</sup> Syarat mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama harus jelas dalam akad, karena akad muzara'ah mengandung imbalan bagi hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktu harus jelas.<sup>81</sup>

Adapun bentuk dari akad *muzara'ah* ada empat yakni:<sup>82</sup> 1) Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah* seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya, 2) Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian, 3) Lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik tanah sedangkan kerja dari petani. Akad seperti ini dibolehkan karena yang menjadi objek adalah jasa petani, 4) Lahan

---

<sup>80</sup> Diaz Rizqi Wardani, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol6, No.7,(2019),h. 1455.

<sup>81</sup> Haris Faulidia Hasnawi, "Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Millah* Vol IV, No. 2 (2005), h. 106.

<sup>82</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 222.

pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik tanah sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-syaibani akad ini tidak sah karena peralatan pertanian harus mengikuti kepada petani bukan pemilik lahan. Manfaat lahan adalah untuk mengolah pertanian.

Adapun kerjasama pertanian akad muzara'ah dapat dikatakan berakhir dalam keadaan :<sup>83</sup> 1) Meningalnya salah satu pihak yang melakukan akad, 2) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Apabila waktu akad *muzara'ah* berakhir, maka hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan di antara keduanya. Namun, bila akad *muzara'ah* telah berakhir sedangkan tanaman yang ditanam belum panen maka akad *muzara'ah* tetap berlangsung sampai masa panen. Namun, petani berhak menerima upah dari pekerjaannya dengan memelihara lahan pertanian di luar akad *muzara'ah*, 3) Jika terjadi bencana alam yang membuat tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir, 4) Akad fasakh disebabkan adanya uzur (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzara'ah* diantaranya, 5) Pemilik lahan terbelenggu utang yang mengakibatkan dia pailit sehingga lahan pertanian tersebut harus di jual, 6) Pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad.

Hikmah yang diperoleh ketika melakukan kerjasama pertanian ialah terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak penggarap dan pemilik lahan, Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki

---

<sup>83</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 223.

lahan, namun mempunyai potensi untuk mengelolah lahan pertanian dengan baik, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengikuti sunnah Rasulullah saw.<sup>84</sup>

### **E. Konsep Kesejahteraan**

Kesejahteraan atau sejahtera dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan keamanan, kesehatan, kebahagiaan, makmur dan terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. Kata sejahtera mengandung pengertian bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Catera dalam konteks kesejahteraan yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran sehingga hidup aman dan tentram lahir dan batin.<sup>85</sup> Sejahtera dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata “*Welfare*” yang artinya aman, sentosa dan makmur. Kesejahteraan adalah suatu kepentingan yang tertuju pada pencapaian kehidupan sejahtera bagi pribadi dan identitas kelompok.<sup>86</sup> Menurut Todaro dalam jurnal kesejahteraan petani penggarap pada penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* yang ditulis oleh Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah mengemukakan bahwa kesejahteraan dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan yang dilihat dari kemampuan masyarakat dalam

---

<sup>84</sup> Djejen Zainuddin, Pendiidkan Agama Islam Fikih, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012), h. 137.

<sup>85</sup> Astuti, dkk “Pemetaan tingkat kesejahteraan keluarga di Kecamatan Banjarmasin selatan” *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol 4, No.2 (2017), h. 22.

<sup>86</sup> Firman setiawan, “Kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep Madura” *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, No. 2 (2019), h. 322.



pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kesehatan, pendidikan.<sup>87</sup>

Kesejahteraan menurut Naskun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*). Keadaan sejahtera dapat dilihat dari kemampuan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan keluarga baik barang ataupun jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual yang meliputi rasa aman, tentram lahir batin yang memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk melakukan usah-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, rumah tangga dan masyarakat.<sup>88</sup>

Kesejahteraan dalam pandangan Islam berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan konvensional. Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada materi saja dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik kesejahteraan material, spiritual maupun moral.<sup>89</sup> Indikator sejahtera menurut Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani,

---

<sup>87</sup> Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah, "Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung" jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan, Vol 6, No 7 (2019), h. 1452.

<sup>88</sup> Rosni "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara" *Jurnal Geografi*, Vol, 9, No. 1 (2017),h.58.

<sup>89</sup> Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah, "Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara'ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung" jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan, Vol 6, No 7 (2019), h. 1452.

keberkahan rezki yang diterima, keluarga sakinah mawaddah warahma, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya materi namun mempertimbangkan spiritual individu.

Syariat Islam telah mengajarkan bagaimana manusia menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek religious akan tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai makhluk sosial dengan menjaga hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. As syatibi mengatakan bahwa kesejahteraan dapat tercapai apabila memenuhi tujuan syariah (*maqashid syariah*).

*Maqashid syariah* berasal dari bahasa Arab, *Maqashid* yang merupakan jamak dari *Maqshud*, (tujuan atau sasaran). Sehingga secara terminologi *Maqashid syariah* merupakan sejumlah tujuan yang baik diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang hal lain. Al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori yaitu *Dharuriyah*, *Hijayyat* dan *Tahsiniyat*.<sup>90</sup> Kebutuhan *Dharuriyat* (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi guna mencapai kemaslahatan. Kebutuhan *Hijayyat* (sekunder) yang meliputi sarana pendidikan, akses kesehatan. Sedangkan kebutuhan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier) yang meliputi kebutuhan pelengkap dan member nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Misalnya desain rumah, transportasi, hiburan.

---

<sup>90</sup> Emily Nur Saidy dan Ilman "Implementasi *Al-Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli" *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019), h. 25.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan sebagai bagian dari *rahmatan lil alamin* yang di ajarkan dalam Agama Islam. Allah swt memberikan kesejahteraan kepada manusia jika melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam firman Allah QS Al-Baqarah:2/126 :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Terjemahannya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".<sup>91</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah kesejahteraan diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah swt. Agama Islam mengajarkan tentang konsep berbagi, membagi kebahagiaan tidak hanya untuk individu melainkan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia.<sup>92</sup>

Dari beberapa definisi kesejahteraan diatas kesejahteraan dapat diukur dari beberapa indikator. Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran sehingga masyarakat tersebut bisa dikatakan sejahtera atau tidak. Indikator kesejahteraan

<sup>91</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al Cordoba, 2016), h. 19.

<sup>92</sup> P. Pardomuan, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam" *Jurnal Bisnis*, Vol 1 , No. 1 (2018), h. 11.

meliputi : 1) Pendapatan dimana pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh dari suatu usaha tertentu yang biasanya akan dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi, kesehatan maupun pendidikan. 2) pendidikan. 3) Kesehatan jadi kesehatan adalah kesejahteraan dari tubuh indicator kesehatan diantaranya kemampuan dalam pemenuhan pangan dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum, sandang yaitu untuk keperluan pakaian, sandal dll, kesehatan dalam hal penyediaan ongkos untuk biaya ke dokter, perawatan dan obat-obatan. 4) Perumahan Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat belindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang bisa dikatakan sejahtera adalah memiliki luas 10m. Dengan status kepemilikan milik pribadi.<sup>93</sup>

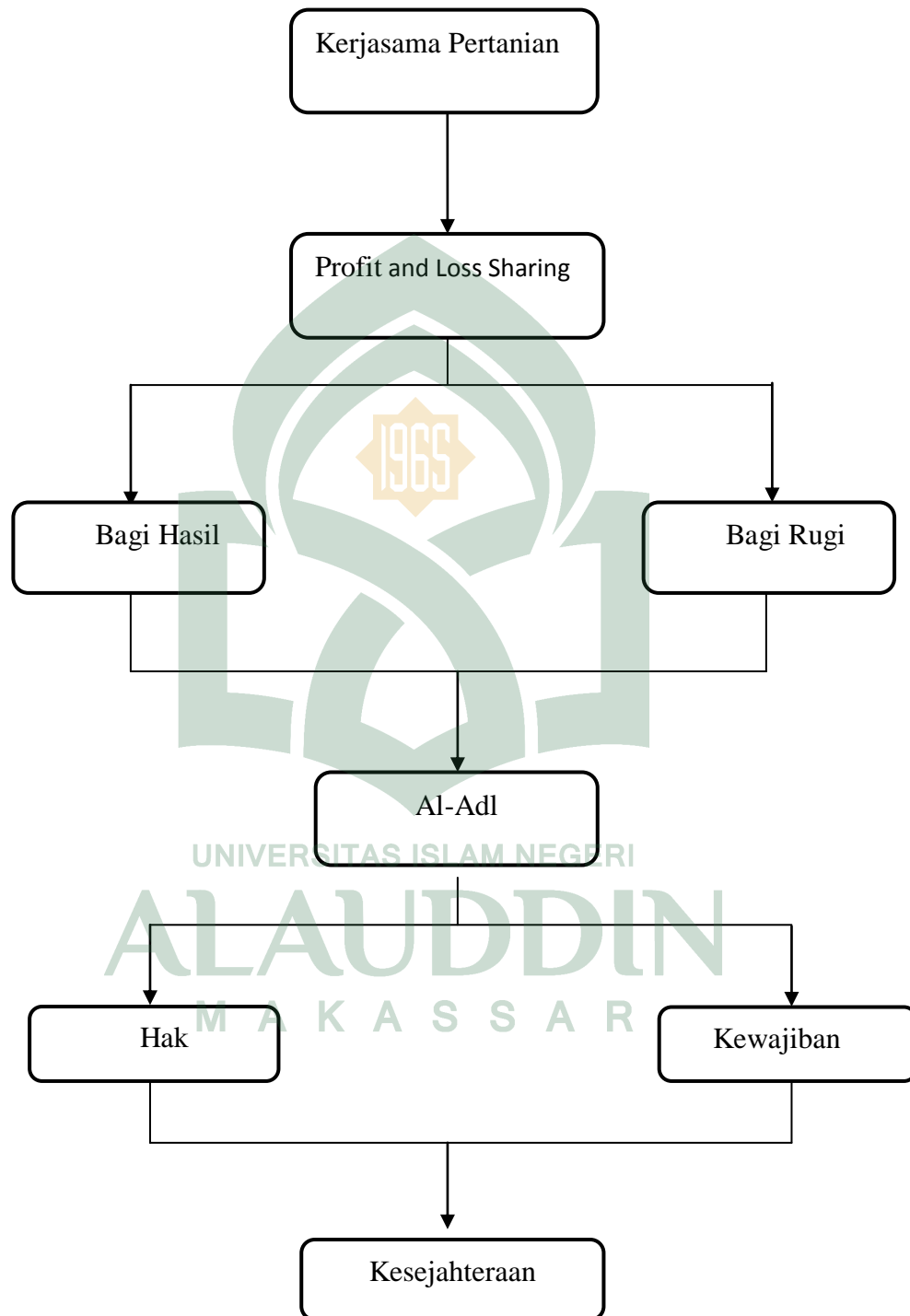
#### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran. Kerangka pikir biasanya digunakan untuk memudahkan penelitian dalam mengetahui implementasi *profit and loss sharing* berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang mana kerjasama pertanian merupakan pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam sebab kerjasama pertanian dapat memberikan hasil dan manfaat yang besar. Seperti halnya kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Dalam hal ini kerjasama dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dengan perjanjian setelah panen adanya imbalan bagi

---

<sup>93</sup> Dias rizqi wardani dan Siti inayatul faizah, “Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara’ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung” jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan, Vol 6, No 7 (2019), h. 1453.

hasil sesuai kesepakatan. Dengan adanya kerjasama pertanian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### *A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif Menurut Creswel (1998) Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, dan sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan landasan teori yang ada sebagai bahan pendukung yang dapat memandu agar fokus peneliti sesuai fakta lapangan dan menghasilkan suatu teori.<sup>94</sup>

Jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena melihat perkembangan pertanian di Kabupaten Enrekang Khususnya wilayah Kecamatan Anggeraja. Dimana Enrekang dikenal sebagai daerah penghasil sayur-sayuran bahkan pada beberapa tahun terakhir ini tercatat sebagai daerah penghasil Bawang merah

---

<sup>94</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PrenamediaGroup, 2017), h. 34.

terbesar ke tiga di Indonesia. Hampir setiap lahan yang berada di Kecamatan tersebut di kelola untuk tanaman bawang merah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan normatif. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al-Qur'an dan hadist yang menyangkut tentang isi penelitian.
2. Pendekatan sosiologis. Karena untuk memperoleh data perihal kegiatan atau aktivitas masyarakat yang hendak diteliti, sehingga peneliti akan melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat petani bawang merah di wilayah Kabupaten Enrekang Kecamatan Anggeraja.

## **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan hal penting dalam melakukan penelitian Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.<sup>95</sup> Berdasarkan pengertian diatas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari suatu instansi atau lembaga baik berupa wawancara, pendapat individu atau kelompok, maupun hasil observasi dan wawancara.

---

<sup>95</sup>Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.129.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa jurnal penelitian, buku, majalah, artikel, kamus, catatan, serta bahan acuan lainnya.

### D. Jenis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
2. Kutipan langsung seperti mengutip pendapat para ahli secara langsung melalui buku dan lain sebagainya.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini bersumber dari penelitian lapangan seperti diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan memperhatikan sendiri berbagai fenomena melalui (pengamatan dan penginderaan). Dalam metode pengumpulan melalui observasi peneliti akan terfokus terhadap kejadian, gejala-gejala atau sesuatu objek yang akan diteliti.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 37.



## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data melalui kegiatan Tanya jawab serta berhadapan langsung dengan orang yang akan memberikan keterangan terkait masalah yang akan di teliti.<sup>97</sup> Dimana peneliti akan melakukan wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Maksudnya, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam dengan fokus permasalahan. Sedangkan wawancara terstruktur maksudnya peneliti menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan masalah.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil atau membuat catatan dan dokumen-dokumen penting yang dapat membantu peneliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengelolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

---

<sup>97</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kecana, 2009), h. 15.

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu (1) Pengumpulan data peneliti mencatat semua data secara objektif penerapan pembagian untung dan rugi berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.(2) Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan,. Reduksi data dalam hal ini adalah setelah terkumpulnya data tentang penerapan pembagian untung dan rugi berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani, maka peneliti harus mampu memilih yang sesuai dengan penelitian atau benar-benar akurat untuk disajikan. (3) Penyajian Data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks , grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna mengabungkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisa dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah yang menarik kesimpulan yang ataukah terus melangkah melakukan analisis menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.(4)Penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara

mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Mulai dari peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data atau pemilihan, setelah reduksi kemudian diadakan penyajian data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

#### **G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian**

Teknik keabsahan data memanfaatkan diluar data yang terkumpul untuk keperluan sebagai pembandingan terhadap data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data untuk menghasilkan data memberikan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan ialah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh, merupakan data yang absah.<sup>98</sup> Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu:

##### **1. Triangulasi data**

Triangulasi data adalah menggali kebenaran tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dan observasi,

---

<sup>98</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 78.

peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen pribadi dan gambar maupun foto. Masing-masing cara itu mendapatkan bukti dan data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keleluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam memahami fenomena di tempat penelitian.

## 2. Triangulasi teori

Triangulasi teori, adalah hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini mengenai penerapan pembagian *profit and loss* sharing berbasis *al-adl* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sehingga memperoleh gambaran atau temuan. Triangulasi teori juga dapat meningkatkan kedalaman pengetahuan peneliti jika peneliti mampu atau bisa menggali pengetahuan teori secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Triangulasi teori memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadukan. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian dan pengumpulan data yang lebih lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Pada triangulasi ini, peneliti akan melihat bagaimana penerapan pembagian untung dan rugi pada kerjasama pertanian bawang merah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Luas Wilayah**

Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Enrekang. Wilayah Kecamatan Anggeraja terletak sekitar 30 km dari ibukota kabupaten. Kabupaten Enrekang terletak 235 km sebelah utara Kota Makassar terdiri dari 12 Kecamatan 17 Kelurahan dan 112 Desa, dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 1.786,01 km. Dengan jumlah penduduk sekitar 190.579 jiwa.

Luas wilayah di kecamatan Anggeraja adalah 126,96 km dengan jumlah penduduk sekitar 26.002 jiwa yang terdiri dari 15 Desa dan kelurahan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Batas Utara : Kecamatan Alla
- Batas Timur : Kecamatan Baraka
- Batas Selatan : Kecamatan Enrekang
- Batas Barat : Kecamatan Masalle

##### **2. Kependudukan**

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan suatu daerah ditandai dengan kemampuan penduduk dalam suatu wilayah untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Gambaran tentang penduduk suatu wilayah akan dirinci berdasarkan jumlah penduduk, Jenis kelamin dan kelompok umur menurut desa dan kelurahan.

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Kelurahan Kecamatan Anggeraja**

No	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Tindalun	726
2	Bampapuang	1.974
3	Tanete	3.023
4	Lakawan	3.586
5	Singki	1.552
6	Mataran	2.811
7	Pekalobean	1.909
8	Bubun Lamba	1.349
9	Salu Dewata	956
10	Mampu	1.464
11	Batu Noni	2.690
12	Saruran	1.009
13	Tampo	984
14	Mendatte	689
15	Siambo	1.044
	<b>Total</b>	<b>26.002 jiwa</b>

Sumber: Kecamatan Anggeraja Dalam Angka 2020.

Dari tabel. 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Anggeraja adalah sebanyak 26.002 jiwa dengan klasifikasi dari 15 Desa dan kelurahan.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Kelamin**  
**Kecamatan Anggeraja**

No	Desa atau Kelurahan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Laki-laki + Perempuan (Orang)
1	Tindalun	341	385	726
2	Bambapuang	943	1.028	1.971
3	Tanete	1.524	1.520	3.044
4	Lakawan	1.738	1.870	3.608
5	Singki	807	740	1.547
6	Mataran	1.432	1.408	2.840
7	Pekalobean	972	934	1.906
8	Bubun Lamba	659	706	1.365
9	Saludewata	493	476	969
10	Mampu	770	712	1.482
11	Batu Noni	1.433	1.387	2.820
12	Saruran	499	518	1.017
13	Tampo	480	496	976
14	Mandatte	331	358	689
15	Siambo	563	479	1.042
<b>Total</b>		<b>12.985</b>	<b>13.017</b>	<b>26.002</b>

Sumber: Kecamatan Anggeraja Dalam Angka 2020.

Dari tabel. 4.2 menunjukkan bahwa dari Jumlah Penduduk di Kecamatan Anggeraja sebanyak 26.002 jiwa sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 13.017 dan selebihnya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12.985.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Kecamatan Anggeraja**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	1.318	1.316	2.634
5-9	1.378	1.331	2.709
10-14	1.407	1.322	2.729
15-19	1.234	1.140	2.374
20-24	882	772	1.654
25-29	939	865	1.804
30-34	912	879	1.791
35-39	821	869	1.690
40-44	846	770	1.616
45-49	741	806	1.547
50-54	625	671	1.269
55-59	519	602	1.121
60-64	398	489	887
65+	393	424	817
<b>Total</b>	<b>13.017</b>	<b>26.002</b>	

Sumber: Kecamatan Anggeraja Dalam Angka 2020.

Data yang ditampilkan pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif yaitu pada usia 15-54 tahun sebanyak 13.745 jiwa, kemudian pada usia non-produktif 0-14 sebanyak 3.969 jiwa, dan usia lebih



dari 55 tahun sebanyak 2.825 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Anggeraja memiliki sumber daya manusia dalam hal ini, penduduknya sebagian besar berada pada kategori umur produktif sehingga sangat berpotensi untuk membangun wilayah tersebut.

## **B. Penerapan *profit and loss sharing* pada kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**

Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam sebab kerjasama pertanian dapat memberikan hasil dan manfaat yang besar. Kerjasama perjanjian pengolahan lahan pertanian biasanya dilakukan oleh masyarakat di pedesaan pada umumnya, hal tersebut dilatarbelakangi minimnya lapangan kerja serta keahlian lain selain menjadi seorang petani serta didukung oleh lahan pertanian yang cukup luas. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Berbicara tentang sistem bagi hasil dan rugi utamanya antara pemilik lahan dan penggarap dalam hal ini dilakukan oleh petani bawang merah. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis alur sistem penerapan *profit and loss sharing* pada kerjasama pertanian yang digunakan petani di kecamatan Anggeraja, menjelaskan sistematika perjanjian kerjasama serta penerapan bagi hasil *profit and loss sharing* berdasarkan untung dan rugi.

### **1. Sistem Kerjasama Pertanian Bawang Merah**

Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Enrekang yang terkenal dengan pertaniannya. Oleh karena itu hampir sebagian penduduk menggantungkan hidupnya pada sector pertanian salah satunya usaha

tani bawang merah baik kerjasama pengolahan lahan ataupun sebagai buruh dalam pertanian bawang merah. Dalam Islam kerjasama pertanian sangat dianjurkan selain memberikan hasil yang besar juga dapat mempererat tali persaudaraan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Pelaksanaan kerjasama pertanian bawang merah ini melibatkan dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh terhadap tanah yang akan di kelola serta sebagai pemodal dalam kerjasama tersebut.

Adapun penggarap lahan adalah orang yang membantu pemilik lahan dalam pengolahan lahan pertaniannya, dalam hal ini si penggarap bertanggung jawab untuk penanaman, merawat tanaman sampai panen. Dengan kesepakatan imbalan bagi hasil. Kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik lahan mencari orang yang di percaya dan sudah dikenal yang memiliki keahlian untuk usaha tani bawang merah. Setelah pemilik lahan mendatangi penggarap dan menawarkan kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil, jika penggarap setuju maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai perjanjian menurut masyarakat di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap maka pada saat itulah penggarap mulai mengolah lahan dari si pemilik mulai dari penanaman, pemberian pupuk, perawatan sampai pada panen.<sup>99</sup>

Perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan tertulis dan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dimana kedua pihak tersebut sepakat akan

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Pak Setiadi, pemilik lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

melakukan apa yang diperjanjikan itu.<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Pak Syahrul selaku pemilik lahan mengatakan bahwa:

“Perjanjian kerjasama pertanian dilakukan hanya secara lisan, tanpa adanya saksi, atas unsur saling percaya dan tolong menolong antara kedua pihak. Tidak secara tertulis atau pelaporan ke pemerintah setempat karena terlalu rumit.”<sup>101</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat pedesaan pada umumnya sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, perjanjian secara lisan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena mereka sudah saling percaya selain itu perjanjian secara tertulis dirasa canggung sehingga tidak melakukan secara tertulis namun hanya kata sepakat dimana dalam perjanjian dibahas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak kemudian menyepakati presentase bagi hasil yang umumnya sudah digunakan oleh masyarakat setempat, adapun mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan. Sebagian masyarakat tidak tahu bahwa perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian sudah diatur dalam undang-undang sehingga mereka hanya melakukan sesuai adat kebiasaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Daen selaku penggarap lahan:

“Perjanjian dilakukan secara lisan dan telah disepakati presentase bagi hasil serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sedangkan mengenai jangka waktu tidak ditentukan, perjanjian akan tetap berlangsung jika penggarap masih kuat”.<sup>102</sup>

Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat melakukan kerjasama pertanian dalam bentuk akad *muzara'ah* salah satunya ialah, hal yang berkaitan dengan

---

<sup>100</sup> Ahmad Otong Buthomi, dkk “Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Mustashafa*, Vol 3, No. 2 (2018), h. 272.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Pak Syahrul selaku pemilik lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Pak Daen penggarap lahan pada tanggal 20 Oktober.

hasil dari tanaman yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), hal yang berkaitan dengan waktu, dimana jangka waktu perjanjian harus jelas dalam akad agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.<sup>103</sup>

Pada umumnya presentase bagi hasil yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak yang sudah disepakati pada saat akad, adapun presentase yang umum digunakan, apabila pemilik lahan sekaligus memodali presentasinya 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap, namun jika lahan berasal dari penggarap maka presentasinya 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, Biasanya perjanjian akan berakhir jika setelah panen pemilik lahan meminta lahannya kembali, ataupun dari pihak penggarap sudah tidak kuat untuk menggarapnya kembali.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil bahwa perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap.<sup>104</sup> Namun pada kenyataannya perjanjian kerjasama bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Anggeraja hanya menggunakan bentuk lisan, perjanjian tersebut hanya pada kata sepakat antara pemilik dan penggarap. Dalam pasal 3 Undang-undang No 2 Tahun 1960 menghendaki perjanjian dilakukan secara tertulis dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik apabila terjadi sengkata dikemudian hari antara kedua belah

<sup>103</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 158.

<sup>104</sup> Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

pihak, karena tidak adanya saksi dan bukti tertulis yang menyatakan bahwa antara pemilik lahan dengan penggarap telah melakukan perjanjian bagi hasil pertanian maka sengketa yang mungkin akan terjadi tidak dapat diselesaikan secara hukum.

Hasil wawancara dengan Pak Jufri Juma selaku kepala desa setempat mengenai sistem perjanjian kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja mengemukakan bahwa:

“Pemilik lahan dan penggarap hanya melakukan perjanjian secara lisan tanpa saksi atas unsur kepercayaan dan tolong menolong antara kedua belah pihak, Adapun jika terjadi perselisihan hanya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat desa setempat”

Sistematika perjanjian kerjasama ini dilakukan karena masih melekatnya prinsip kekeluargaan dikalangan masyarakat khususnya petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja, sehingga perjanjian kerjasama didasari kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu pemahaman masyarakat bahwa lahan/tanah memiliki fungsi sosial yaitu unsur tolong menolong antar sesama. Disamping itu perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian memberikan hasil dan manfaat besar bagi kedua pihak salah satunya membantu petani yang kurang mampu dan masih mencari penghasilan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam firman Allah swt dalam QS Al-Maidah:5/2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

Terjemahannya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksa-Nya”<sup>105</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong yang diwujudkan bukan hanya pemberian sesuatu tetapi juga dalam bentuk pemberian lapangan pekerjaan kepada mereka.

Kerjasama pertanian bawang merah ini dilakukan antara pihak pemilik lahan dengan penggarap, Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan kerjasama diperoleh suatu data perihal alasan yang mendasari kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah diantaranya:

#### 1. Pemilik lahan

- a. Menurut pak Syahrul selaku pemilik lahan sekaligus pemodal mengatakan bahwa alasan beliau melaksanakan kerjasama ini karena pertanian bawang merah merupakan tanaman jangka pendek dengan perputaran yang sangat cepat hanya kurang lebih 3 bulan, adapun alasan lainnya karena tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahannya sendiri karena memiliki pekerjaan lain.
- b. Menurut bapak Nawar alasan melaksanakan kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah karena menurutnya pertanian bawang merah memberikan keuntungan yang besar, selain itu saling membantu sesama yang mempunyai keahlian namun tidak memiliki modal.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al-Cordoba, 2010), h. 106.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Nawar pemilik lahan pada tanggal 20 Oktober 2020

- c. Menurut bapak Setiadi menyampaikan bahwa ia melakukan perjanjian kerjasama pertanian untuk memanfaatkan lahannya, sekaligus tolong menolong antar sesama yang tidak memiliki lahan.

Selain beberapa pernyataan alasan yang disampaikan pemilik lahan di atas, para penggarap lahan bawang merah juga menyampaikan beberapa alasan melakukan kerjasama pertanian tersebut.

## 2. Penggarap lahan

- a. Pak Daen menyampaikan pengolahan pertanian bawang merah di daerah duri merupakan pekerjaan yang menjanjikan dengan imbalan hasil yang cukup besar jika dirawat dengan sebaik-baiknya.<sup>107</sup>
- b. Pak Abdullah menyampaikan bahwa kerjasama pertanian bawang merah dilakukan karena lahan yang dimiliki tidak terlalu luas, lahan itu juga ditanami tanaman lain, Disamping itu beliau juga membutuhkan tambahan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh dari data bahwa faktor ketidaktahuan terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yang mereka tahu perjanjian yang mereka terapkan dengan mengikuti kebiasaan setempat dan sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau yang disebut hukum adat yaitu secara lisan, atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Walaupun sebenarnya perjanjian secara tertulis mempunyai tujuan untuk kebaikan antara pemilik lahan dan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Daen, Penggarap lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Pak Abdullah selaku penggarap lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

penggarap, apabila ada salah satu pihak ingkar janji maka hal tersebut dapat diproses secara hukum untuk kerugian-kerugian yang akan ditanggung.

Unsur kepercayaan juga mendasari kedua pihak melakukan kerjasama hanya secara lisan disini terlihat karena pemilik lahan memberikan kuasa sepenuhnya kepada penggarap untuk mengelola lahannya serta memberikan biaya selama kerjasama pertanian tersebut berlangsung sementara seperti yang kita ketahui bahwa biaya atau modal yang harus dikeluarkan untuk usaha pertanian bawang merah cukup banyak.

Sesuai uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa perjanjian kerjasama pertanian bawang merah yang dilakukan petani di Kecamatan Anggeraja dalam hukum Islam rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama ayaitu adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek atau manfaat, *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini adanya syarat ijab dan qabul dapat dilihat dari kata sepakat antara pemilik lahan dan penggarap sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan petani di Kecamatan Anggeraja telah memenuhi syarat. Selain itu pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsure saling rela dan tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Namun mengenai jangka waktu dan berakhirnya perjanjian tidak menyatakan apakah hanya satu kali panen atau dua kali atau yang lainnya. Proses berakhirnya perjanjian tergantung dari keinginan pemilik, keinginan penggarap. Menurut jumhur ulama syarat berkaitan dengan jangka waktu perjanjian harus jelas pada saat melakukan akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu dan berakhirnya perjanjian bagi



hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Anggeraja tidak sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Penerapan bagi hasil berdasarkan *profit and loss sharing*

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi dan dialami oleh pihak yang melakukan perjanjian kerjasama terkadang memperoleh keuntungan yang memuaskan dan tidak sedikit pula yang mengalami kerugian. Dalam Islam sistem bagi hasil mengarahkan pada pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) yang proporsional dan jelas.<sup>109</sup> Untuk besaran imbalan bagi hasil dalam hukum Islam disebutkan pada saat melakukan perjanjian, tetapi tidak menentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/ton/karung dan lain sebagainya.<sup>110</sup> Dalam hukum Islam Jumhur ulama menetapkan syarat dalam melakukan perjanjian kerjasama pertanian dalam bentuk perjanjian ialah hal yang berkaitan dengan hasil dari tanaman yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad). Antara pemilik lahan dan penggarap sudah mengetahui bagiannya masing-masing.<sup>111</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Setiadi mengenai penerapan *profit and loss sharing* yang digunakan:

“Presentase bagi hasil disepakati pada awal melakukan perjanjian, Adapun presentase yang umum digunakan 60:40 jika pemilik lahan sekaligus pemodal, membiayai mulai dari bibit, sarana produksi, biaya pupuk, gaji buruh dll sedangkan penggarap bertanggung jawab untuk

<sup>109</sup> Andi Sri Wahyuni, “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Istiadat” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4, No. 3 (2013), h. 468.

<sup>110</sup> Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shiddiqie “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta” *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1 (2015), h. 110.

<sup>111</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 158.

merawat tanaman sampai panen. Adapun jika terjadi gagal panen kedua pihak sama-sama menanggung kerugian, dari pihak pemilik lahan kerugian dalam bentuk materi sedangkan dari penggarap rugi tenaga dan waktu”.<sup>112</sup>

Bagi hasil kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai kebiasaan masyarakat setempat dan disepakati pada saat melakukan perjanjian, presentase yang digunakan sesuai dengan kontribusi antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Jika pihak pemilik lahan sekaligus pemodal. Sedangkan pihak penggarap bertanggung jawab atas penanaman dan perawatan sampai panen. Maka presentase yang umum digunakan ialah 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap. Adapun jika lahan dari penggarap maka presentasinya 50:50. Selanjutnya mengenai bibit biasanya pemilik modal memesan bibit dari Bima, Magelang atau menggunakan bibit sendiri. Bibit yang disiapkan disesuaikan dengan luas lahan yang akan di garap, semakin luas lahan otomatis akan dibutuhkan bibit dengan jumlah yang banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Syahrul selaku pemilik lahan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Bagi hasil yang digunakan 60:40. Dengan luas lahan kurang lebih  $\frac{1}{4}$  Ha membutuhkan bibit sebanyak 125 kg. menyiapkan modal kurang lebih 30 juta. Lahan luas  $\frac{1}{4}$  Ha itu bisa menghasilkan sekitar 3.700 kg bawang merah. Perhitungan bagi hasilnya, jika pasaran bawang merah 30rb/kg maka total hasil yang didapatkan sekitar Rp. 111.000.000 dari hasil tersebut sebelum dibagi akan dikeluarkan terlebih dahulu keseluruhan modal yang sudah digunakan jadi Rp. 111.000.000 – Rp.30.000.000= Rp. 81.000.000 hasil bersih. Jadi Rp. 81.000.000 akan di bagi antara pemilik modal dengan penggarap karena presentase nya 60:40 maka pemilik modal mendapat Rp. 50.000.000 sedangkan penggarap mendapat 31.000.000”.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Wawancara dengan Pak Setiadi selaku pemilik lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Syahrul, Pemilik lahan pada tanggal 20 Oktober 2020

Seperti yang telah di paparkan pada bab sebelumnya mengenai perhitungan bagi hasil dimuat dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil dijelaskan bahwa bagi hasil dilakukan setelah dikurangi modal. Hasil bersih yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus di pikul bersama seperti benih, pupuk, biaya tanaman, biaya panen dll.<sup>114</sup> Dalam pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja dengan mengeluarkan hasil terlebih dahulu untuk biaya atau modal yang sudah digunakan setelah itu hasil akan dibagi dua antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai dengan presentase yang telah disepakati pada saat melakukan perjanjian. Dalam hal modal untuk pertanian bawang merah tidak permanen, terutama biaya pestisida yang selalu mengalami perubahan harga sehingga perihal modal belum permanen karena mengikuti perkembangan tanaman bawang merah tersebut.

Dalam pertanian kedua pihak dalam hal ini pemilik lahan dan penggarap lahan mengupayakan agar pertanian yang dilakukan dapat memberikan hasil dan keuntungan yang besar. Namun seperti yang kita ketahui bahwa melakukan perjanjian kerjasama terkadang memperoleh keuntungan yang memuaskan dan tidak sedikit pula yang mengalami kerugian diantaranya disebabkan karena factor hama.

Hasil wawancara dengan Pak Daen selaku penggarap lahan mengemukakan bahwa:

---

<sup>114</sup> Dahrum dan Thamrin Logawali “Penerapan Sistem Muzara’ah Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 2, No. 2 (2016), h. 9.

“Jika terjadi gagal panen akibat serangan hama tinggi maka kerugian akan di tanggung kedua belah pihak dari pemilik lahan rugi materi sedangkan penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga, Namun dalam hal ini ada sebagian dari pemilik lahan memberikan sedikit uang makan (assepenawa) kepada penggarap. Namun adapula yang tidak memberikan sama sekali.”<sup>115</sup>

Ada beberapa jenis hama yang biasa menyerang tanaman bawang merah diantaranya ulat graya ulat ini menyerang tanaman pada bagian daun, lalat penggorok yang juga menyerang daun tanaman ditandai dengan adanya bekas goresan seperti alur putih pada daun, Kutu yang dapat menghisal daun sehingga menyebabkan daun menjadi kecil.

Serangan hama sebagai pemicu utama terjadinya gagal panen pertanian bawang merah. Kondisi kelembapan tanah dan udara memungkinkan hama dapat hidup dan berkembang dengan baik. Hama dapat menyerang bagian batang tanaman bawang merah dengan cara memotong sampai putus dan menyisakan pangkal batangnya saja sehingga membuat tanaman menjadi kuning sehingga tanaman akan rebah dan mati. Pak Daen juga mengemukakan bahwa penggunaan pestisida secara intensif dan saluran irigasi yang baik dapat menekan perkembangan hama pada tanaman bawang merah. Sehingga pada saat hama mulai menyerang tanaman ada beberapa pemilik yang kemudian mengeluarkan kembali biaya besar untuk pembelian pestisida untuk segera mengatasi serangan hama, dalam hal ini adapula pemilik lahan yang enggan untuk merawatnya kembali karena untuk perawatan kembali harus mengeluarkan biaya yang besar.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Pak Daen penggarap lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

Apabila dari perawatan kembali memberikan hasil walaupun sedikit maka hasilnya tetap akan dibagi sesuai presentase yang telah disepakati.

Hasil wawancara dengan pak Jufri Juma selaku kepala desa setempat:

“Kegagalan panen terjadi karena serangan hama tinggi, dalam hal ini bukan disebabkan oleh si penggarap karena hama biasanya dipicu karena kelembapan tanah akibat curah hujan yang tinggi”.<sup>116</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa bagi hasil perjanjian kerjasama pertanian bawang merah yang dilakukan petani di Kecamatan Anggeraja. sudah sesuai dengan Undang undang No 2 tahun 1960 tentang bagi hasil dimana bagi hasil merupakan hasil bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi modal atau biaya-biaya yang dikeluarkan selama penanaman bawang. Disamping itu penerapan bagi hasil yang dilakukan sesuai kontribusi antara pemilik lahan dengan penggarap dan di sepakati pada saat akad presentase bagi hasil yang diterapkan merupakan adat kebiasaan setempat yang sudah berlaku turun temurun. Adapun jika terjadi gagal panen akibat dari serangan hama tinggi, maka kerugian akan di tanggung kedua belah pihak dari pemilik lahan rugi materi dan penggarap rugi waktu dan tenaga. Dalam hal ini apabila terjadi gagal panen itu tergantung dari pemilik lahan ada beberapa yang memberikan uang makan (assepenawa) kepada penggarap namun adapula yang tidak memberikan sama sekali, dari pihak penggarap juga tidak menuntut karena menurutnya tidak ada hasil yang diberikan.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Pak Jufri Juma selaku kepala Desa setempat pada tanggal 20 Oktober 2020.

Tabel 4.4

**Penerapan Profit and Loss Sharing kerjasama pertanian bawang merah di  
Kecamatan Anggerja Kabupaten Enrekang**

No	Penerapan	Penjelasan
1	Sistem kerjasama pertanian	Kerjasama pertanian dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, perjanjian dilakukan sesuai adat kebiasaan masyarakat setempat secara lisan atas unsur saling percaya dan tolong menolong antara kedua pihak. Dalam perjanjian dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak serta presentase bagi hasil.
2	<i>Profit and Loss Sharing</i>	a. Presentase bagi hasil sesuai kontribusi kedua pihak. b. Perhitungan bagi hasil, Hasil bersih yaitu hasil kotor setelah dikurangi modal. c. Kerugian ditanggung kedua belah pihak.

**C. Penerapan *profit and loss sharing* dalam konsep *Al-adl* pada kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**

Bagi hasil pertanian merupakan hal yang sangat penting dimana memiliki peranan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat petani. Salah satu bentuk keadilan yang ditekankan oleh Islam ialah keadilan sosial ekonomi dimana setiap individu berhak mendapatkan hak-haknya dan diwaktu yang sama ia juga

harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk merealisasikan keadilan dalam hidupnya.

Berlaku adil terkait dengan hak dan kewajiban, keadilan biasa dimaknakan dengan memberikan hak kepada yang berhak (*yu'thi alhaqq haqqahu*) atau meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadhu assyai ala maudhi'ih*). Menurut Syed Muhammad Naquib Al-attas secara bahasa keadilan pada umumnya adalah tentang pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi suatu benda atau manusia, kebenaran yang menentang kesalahan, cara atau batasan dan kebenaran terhadap kepalsuan.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil penelitian kerjasama pertanian dengan imbalan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Anggeraja ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan karena sistem tersebut sudah dilakukan dari dulu dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, disamping itu bagi hasil tersebut dilakukan karena keuntungan dan kerugian di tanggung bersama serta adanya kerjasama yang bersifat tolong menolong. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Sudarmin selaku pemilik lahan mengenai penerapan *Al-adl* dalam kerjasama pertanian yang dilakukan:

“Pemilik lahan kewajibannya menyediakan lahan, menyiapkan modal sedangkan penggarap kewajibannya melakukan penanaman, penyemprotan dan perawatan tanaman bawang merah sampai panen. Hak dari kedua pihak mendapatkan bagi hasil dari penjualan bawang merah. Bagi hasil yang dilakukan sesuai kontribusi yang diberikan masing-masing pihak dan sudah disepakati..<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> M. Roem Syibly, “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah” *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1, (2015), h. 82.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Pak Sudarmin, pemilik lahan pada tanggal 18 Oktober 2020.

Seperti yang kita ketahui bahwa keadilan dalam kerjasama ialah berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak yang melakukan kerjasama. Dalam hal hak dan kewajiban adapun kewajiban dari pihak penggarai ialah memberikan kembali lahan pemilik jika perjanjian telah selesai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Daen selaku penggarap mengenai penerapan *Al-adl* dalam kerjasama pertanian yang dilakukan:

“Kerjasama yang saya lakukan sudah adil karena presentase bagi hasil yang disepakati sesuai dengan kontribusi saya. Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak di jelaskan pada saat melakukan perjanjian. Jika perjanjian selesai penggarap harus mengembalikan lahan pemilik<sup>119</sup>

Keadilan merupakan sebuah harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat. konsep keadilan menyangkut tentang apa yang setimpal, seimbang dan benar benar sepadan. Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi. Dalam hal muamalah keadilan antara kedua pihak ialah menuntut untuk melakukan perjanjian dengan berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua hak dan kewajiban sesuai yang telah disepakati.<sup>120</sup> Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dijelaskan pada awal melakukan perjanjian.

Kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya dan hak merupakan apa yang diperoleh setelah melakukan kewajibannya. Kedua belah pihak sudah mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan, adapun kewajiban pemilik lahan ialah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di tanami serta bersedia

<sup>119</sup> Wawancara dengan Pak Daen Penggarap lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>120</sup> Muhammad Harfin Zuhdi “Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi” Jurnal Iqtishaduna, Vol, viii, No. 2 (2017), h. 96.



memberikan modal, sedangkan kewajiban dari penggarap ialah melakukan penanaman, pemupukan, serta perawatan lainnya sampai pada panen dan mengembalikan lahan ketika perjanjian kerjasama telah selesai. Adapun hak yang diterima pemilik lahan dan penggarap ialah hasil panen. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Abdullah selaku penggarap lahan:

“Kewajiban dari penggarap ialah bertanggung jawab dalam mengelolah lahan pertanian sampai panen, Dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan, pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelolah, sedangkan penggarap menerima tawaran dari pemilik atas kemauan sendiri untuk pemenuhan kebutuhan tanpa paksaan dari pemilik lahan”<sup>121</sup>

Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap jika dilihat dari prinsip keadilan, menerapkan sebagaimana keadilan dalam muamalah yang menyangkut tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Jufri Juma selaku kepala Desa setempat tentang keadilan dalam kerjasama pertanian di Kecamatan Anggeraja :

“Keadilan pada kerjasama bagi hasil pertanian di kecamatan anggeraja sudah diterapkan dilihat dari pelaksanaannya dimana kewajiban masing-masing pihak sudah dilakukan disamping melakukan kewajiban maka akan ada hak yang akan diterima”<sup>122</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam mengajarkan keadilan hampir dalam setiap aspek kehidupan keadilan dalam hak-hak manusia, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan dan keadilan dalam bermuamalah baik transaksi maupun kerjasama, keadilan dapat terwujud jika dilakukan atas dasar sama-sama rela artinya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Pak Abdullah Penggarap lahan pada tanggal 20 Oktober 2020

<sup>122</sup> Wawancara dengan Pak Jufri Juma Kepala Desa Setempat pada tanggal 20 Oktober 2020.

sehingga dengan adanya penegakkan keadilan akan tercapai kesejahteraan antar kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.<sup>123</sup> Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil berbasis al adl yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Anggeraja dengan menerapkan keadilan dalam bermuamalah dengan menjalankan kewajibannya sehingga memperoleh hak berupa hasil sesuai dengan presentase yang telah disepakati

Dari penjelasan beberapa informan diatas mengenai *profit and loss sharing berbasis al-adl* dalam kerjasama pertanian bawang merah jika di kaitkan dengan konsep keadilan yang menyangkut apa yang setimpal, seimbang dan benar sepadan bagi setiap individu dalam hal ini tentang pelaksanaan kewajiban kedua pihak dan penerimaan hak setelah melakukan kewajiban sudah di rasa adil. Berdasarkan untung dan rugi diarsa sudah cukup adil, dimana presentase pembagian hasil tergantung kontribusi dari kedua belah pihak. Dalam hal ini juga tercipta asas keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima masing-masing pihak.

**Tabel 4.5**

**Penerapan Profit and loss sharing berbasis al-adl Dalam Pertanian Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**

No	Al-Adl	Penjelasan
1	Kewajiban	a. Kewajiban pemilik lahan ialah menyiapkan lahan serta menyediakan modal mulai dari

<sup>123</sup> Firman setiawan, "Kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep Madura" *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, No. 2 (2019), H. 321.

		<p>bibit, sarana produksi, biaya pestisida dan sejumlah biaya untuk perawatan tanaman sampai panen.</p> <p>b. Kewajiban penggarap lahan ialah melakukan penanaman, penyemprotan, pemupukan dan perawatan tanaman sampai panen.</p> <p>c. Kewajiban penggarap ialah menyerahkan lahan pemilik jika perjanjian telah selesai.</p>
2	Hak	<p>Hak adalah kuasa untuk menerima sesuatu yang memang semestinya diterima.</p> <p>a. Hak pemilik lahan ialah memperoleh lahannya kembali setelah perjanjian selesai.</p> <p>b. Memperoleh hasil dari bagi hasil panen sesuai presentase yang di sepakati.</p> <p>c. Hak penggarap ialah menerima hasil sesuai dengan presentase yang telah disepakati.</p>

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020)

**D. Bagaimana penerapan *profit and loss sharing* dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.**

Kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan kesepakatan adanya bagi hasil. Pihak pemilik lahan tidak mempunyai

keahlian serta adanya pekerjaan lain sehingga tidak dapat mengolah lahannya sendiri sehingga memberikan kepercayaan kepada orang lain yang memiliki keahlian serta waktu untuk menggarap lahannya.

Kerjasama pertanian seperti ini dalam wilayah pedesaan memberikan dampak bagi kesejahteraan para petani. Kesejahteraan adalah suatu kepentingan yang tertuju pada pencapaian kehidupan sejahtera bagi pribadi dan identitas kelompok.<sup>124</sup> Kesejahteraan petani dapat diukur melalui beberapa indikator. Berdasarkan teori yang telah di paparkan pada bab 2 indikator untuk mengukur kesejahteraan petani meliputi:

**Tingkat pendapatan,** Pendapatan adalah jumlah uang atau barang yang di terima atau di peroleh dari suatu aktivitas yang telah dilakukan.<sup>125</sup> Pertanian merupakan sektor yang sangat berperan sebagai sumber penyerap tenaga kerja dan sumber utama pendapatan rumah tangga. Dimana pendapatan tersebut biasanya digunakan untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Dari hasil wawancara dengan pak Rahman selaku pemilik lahan:

“Adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah memberikan manfaat besar bagi kedua pihak kesepakatan bagi hasil menjadi pendapatan keduanya. Walaupun harga bawang merah yang tidak tetap, akan tetapi hasil dari kerjasama tersebut sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup”<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Firman setiawan, “Kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep Madura” *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, No. 2 (2019), h. 322.

<sup>125</sup> Rosni “Analilis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara” *Jurnal Geografi*, Vol, 9, No. 1 (2017). 60.

<sup>126</sup> Wawancara dengan pak Rahman, selaku pemilik lahan pada tanggal 20 Oktober 2020.

Pendapatan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga, sebab besar kecilnya pendapatan yang diterima akan mempengaruhi daya beli untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jika pendapatan yang diterima tinggi, maka kemampuan untuk memperoleh barang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Abdullah selaku pemilik lahan:

“Jika hasil produksi tinggi seimbang dengan tingginya harga bawang merah maka pendapatan yang akan diterima juga akan tinggi. Pendapatan yang diterima dari kerjasama digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sampai pada biaya pendidikan”<sup>127</sup>

Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kehidupan petani, pendapatan merupakan suatu hal yang menentukan dalam pencapaian kebutuhan keluarga tani. Pendapatan yang dimaksud disini ialah pendapatan dari kerjasama bagi hasil pertanian. Dalam hal ini pendapatan petani akan tinggi jika hasil produksi bawang merah tinggi dan sejalan dengan harga bawang merah yang tinggi. Jika hasil yang diperoleh petani baik pemilik lahan ataupun penggarap semakin tinggi maka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Kesejahteraan petani dapat dilihat dari kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan baik untuk pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari sampai pada kebutuhan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan perihal pendapatan yang di terima dari kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah dapat di simpulkan bahwa dengan adanya kerjasama tersebut memberikan pendapatan bagi para petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap ataupun

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Pak Abdullah Selaku penggarap pada tanggal 20 Oktober 2020.

bagi petani yang masih membutuhkan tambahan penghasilan. Hasil yang diterima digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, kesehatan dan pemenuhan tempat tinggal yang layak.

**Tingkat pendidikan,** pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif melalui berbagai macam kegiatan seperti penanaman nilai, budi pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral dan lain sebagainya.<sup>128</sup> Dari hasil wawancara dengan Pak Nawar selaku penggarap dalam kerjasama pertanian bawang merah.

“Kerjasama pertanian dengan imbalan bagi hasil sangat membantu keluarga untuk biaya pendidikan. Walaupun tidak ada pembayaran uang sekolah di pedesaan namun kebutuhan untuk biaya-biaya pendidikan seperti pembelian buku, peralatan sekolah dan seragam sekolah, apalagi dengan kondisi sekarang ini adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan anak-anak sekolah belajar secara online dengan kebutuhan handpone dan data internet yang digunakan”.<sup>129</sup>

Pendidikan sebagai usaha pengembangan karakter dan penanaman nilai-nilai agama serta pelatihan nilai-nilai moral, tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kesejahteraan keluarga tani, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh semakin tinggi kemampuan untuk terampil dan produktif, dengan keaktifan yang dimiliki lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga tani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Sudarmin:

---

<sup>128</sup> Inanna”Peran Pendidikan Dalam membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral” *Jurnal Jekpend*, Vol 1, No 1 (2018), h. 28.

<sup>129</sup> Wawancara dengan pak Sudarmin, selaku penggarap pada tanggal 20 Oktober 2020.

“Sebagian pendapatan yang diterima digunakan untuk biaya sekolah dan pembayaran TPA”

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan meliputi pendidikan formal, non formal dan informal dimana pendidikan formal adalah jenjang pendidikan yang terstruktur mulau dari Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah keatas sampai pada tingkat perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal pendidikan diluar pendidikan formal yang meliputi pelatihan, kelompok belajar, lembaga kursus dan TPA sebagai wadah penanaman nilai-nilai agama seperti pelatihan membaca al-quran.

Hasil wawancara dengan pak Abdullah selaku penggarap dalam kerjasama pertanian bawang merah menurut beliau bagi hasil dari kerjasama tersebut sangat membantu dalam hal biaya pendidikan anak-anaknya.

“Pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk kemajuan lebih baik bagi anak-anak. Saya hanya lulusan SMP dan keahlian hanya pada bidang pertanian, hal tersebut menjadi acuan saya agar dapat menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Adanya kerjasama bagi hasil seperti ini sangat membantu dalam hal biaya pendidikan anak-anak, sampai perguruan tinggi mulai dari pembayaran uang semester, pembayaran uang kost dan pembelian buku-buku”.<sup>130</sup>

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, Dengan demikian pendidikan menentukan sejahtera atau tidaknya seseorang, dengan pendidikan tinggi maka orang tersebut memiliki keterampilan dan produktif untuk memperoleh pendapatan yang tinggi guna memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam keluarga tani yang sebagian besar orang tuanya hanya tamat sekolah dasar menjadi motivasi tersendiri bagi

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan pak Abdullah selaku penggarap pada tanggal 20 Oktober 2020.

orang tua untuk lebih memperhatikan tingkat pendidikan anak-anaknya. Pada wilayah pedesaan umumnya factor ekonomi yang menyebabkan banyak anak-anak putus sekolah, factor ekonomi dalam hal ini ialah ketidakmampuan keluarga untuk membiayai segala kebutuhan selama menempuh pendidikan. Namun dengan adanya perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat khususnya petani bawang merah di kecamatan Anggeraja memberikan pendapatan dari hasil panen untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah sangat membantu kedua pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian dimana dengan hasil yang diperoleh digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak para petani. Baik untuk biaya pendidikan formal, non formal. Biaya pendidikan formal mulai dari pembelian alat dan seragam sekolah TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi pembiayaan uang kuliah mulai dari uang semester dan uang kost.

**Kesehatan,** keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial. Dengan keadaan sehat setiap orang akan hidup produktif. Kesehatan merupakan factor untuk memperoleh pendapatan dan pendidikan. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera ialah meliputi ketersediaan pangan yang bergizi. Kerjasama bagi hasil pertanian mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat khususnya petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja . Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Daen dari segi tingkat kesehatan dari kerjasama pertanian bawang merah yang dilakukan:



“Dari hasil kerjasama pertanian untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan sudah cukup. Hasil yang didapatkan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi seperti membeli sayur, lauk pauk yang bergizi.”<sup>131</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan pangan menjadi indikator kesehatan. Dalam hal ini kerjasama pertanian bagi hasil yang dilakukan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja meningkatkan kesehatan penggarap dan keluarga dimana hasil yang diperoleh sebagian dipegunakan untuk pemenuhan makan yang bergizi. Karena kesehatan sebagai suatu hal yang sangat penting tanpa kesehatan yang baik maka dalam hal ini akan sulit untuk melakukan aktivitasnya.

Hal itu juga diungkapkan oleh Pak Nawar selaku pemilik lahan :

“Kesehatan merupakan hal penting menyangkut aktivitas yang akan dilakukan. Dengan adanya hasil dari kerjasama pertanian bisa digunakan untuk biaya pembelian obat-obatan baik untuk pribadi maupun keluarga, walaupun mempunyai kartu BPJS namun tidak menutup kemungkinan ada obat-obat dari luar puskesmas atau rumah sakit yang harus di tebus sendiri misalnya pengambilan obat di apotek luar”.<sup>132</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian sangat membantu dalam hal peningkatkan kesehatan mulai dari kesehatan badan dengan terpenuhinya makanan bergizi sampai pada terpenuhinya biaya untuk pembelian obat-obatan. Dengan kesehatan yang dimiliki kedua belah pihak baik pemilik lahan dan penggarap dapat hidup produktif dalam hal ini bisa melaksanakan kerjasama bagi hasil pertanian untuk memperoleh pendapatan.

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Pak Daen selaku penggarap pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>132</sup> Wawancara dengan pak Nawar, pemilik lahan pada tanggal 18 Oktober 2020.

**Tingkat Perumahan,** Perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap yang baik. Dikatakan sejahtera dalam hal tingkat perumahan jika status kepemilikan tempat tinggal ialah milik pribadi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan penulis jika dilihat dari indikator perumahan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Anggeraja sudah dikatakan sejahtera, walaupun ada beberapa dari masyarakat yang belum memiliki hak atas kepemilikan rumah. Akan tetapi sebagian besar sudah memiliki hak atas kepemilikan rumah yang juga didukung oleh fasilitas seperti listrik dan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Pak Nawar selaku Pemilik lahan :

“Dari hasil kerjasama pertanian digunakan untuk pembiayaan listrik, PDAM dan sebagainya untuk merenovasi rumah dan pembelian perabotan rumah tangga”<sup>133</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Jufri Juma selaku kepala Desa setempat:

“Kerjasama pertanian bawang merah itu untung nya sangat banyak jika mujur atau hasil produksi banyak sebanding dengan harga pasar bawang merah tinggi. Kadang jika hal demikian terjadi para petani baik pemilik lahan dan penggarap memperoleh hasil puluhan juta rupiah. Dari hasil yang diperoleh biasanya ada yang langsung merenovasi rumahnya yang sebelumnya rumah kayu menjadi rumah batu”.<sup>134</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap lahan sangat membantu mereka dalam hal pemenuhan tempat tinggal. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki rumah serta membeli fasilitas rumah tangga yang mereka butuhkan.

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Pak Nawar Pemilik lahan pada tanggal 18 Oktober 2020.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Pak Jufri Juma kepala desa setempat pada tanggal 20 Oktober 2020.

Selain indikator kesejahteraan secara umum, terdapat juga indikator kesejahteraan dalam Islam. Dimana Islam adalah agama yang menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umatnya. Makna sejahtera sejalan dengan misi Islam yakni selamat, aman, damai dan sentosa. Kesejahteraan menurut Ekonomi Islam merupakan suatu pencapaian yang bukan hanya dari segi materi namun juga hal yang bersifat non materi seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual. Menerapkan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam prinsip syariah di sistem pertanian dan perekonomiannya bukan hal mustahil suatu kesejahteraan akan tercapai. Sebagaimana dalam firman Allah QS.Al-A'raf: 2/96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣٥﴾

Terjemahannya:

Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.<sup>135</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang balasan Allah swt dengan menjanjikan surge dan kehidupan yang layak di dunia bgai orang-orang yang taat kepadanya. Selain itu telah di contohkan dalam kehidupan Rasulullah saw yang menerapkan prinsip syariah dalam bertani dan berekonomi. Dimana kesejahteraan dapat dirasakan akibat penerapan prinsip-prinsip syariah.

<sup>135</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung Al Cordoba. 2016), h. 163.

Kesejahteraan dalam prespektif Islam dapat tercapai jika setiap orang bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya, merasa aman, tentram sehingga dapat melakukan ibadah dengan khusyu di sela-sela kesibukannya. Masyarakat di Kecamatan Anggeraja ataupun para petani melakukan kerjasama bagi hasil tidak menjadikan kendala untuk menunaikan kewajibannya selaku ummat muslim melaksanakan shalat lima waktu di tengah kesibukannya. Pada saat adzan sudah berkumandang mereka juga bersiap-siap pulang kerumah untuk shalat sekaligus istirahat. Begitupun saat bulan ramadhan mereka tetap melaksanakan puasa, sedekah dan ibadah lainnya. Mereka tidak melupakan ibadah karena menurut mereka hanya kepada sang pencipta kita meminta pertolongan dalam hal ini kesehatan yang telah diberikan sehingga tetap kuat dalam melakukan kerjasama bawang merah. Dari hasil kerjasama pertanian bawang merah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dari penjelasan beberapa narasumber dapat di simpulkan bahwa dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah yang dilakukan petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sangat membantu petani dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup baik dari segi materi dan spritual. Hal itu di tunjukkan dengan adanya beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang telah memenuhi kriteria sejahtera. Meskipun peningkatkan pendapatan tersebut tidak signifikan namun dari beberapa informan mengatakan bahwa sudah merasakan adanya perubahan kondisi kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel 4.6

**Penerapan Profit and Loss Sharing Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  
Petani Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja.**

No	Indikator Kesejahteraan Petani	Penjelasan
1	meningkatkan Pendidikan	<p>Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan karakter baik dari segi penanaman nilai agama, budi pekerti, pembelajaran dan pelatihan moral dan lain sebagainya. Dalam penerapannya Kerjasama pertanian bawang merah yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap sangat membantu:</p> <p>a. Biaya pendidikan formal mulai dari SD,SMP,SMA dan sampai perguruan tinggi.</p> <p>b. Biaya pendidikan non formal seperti pembayaran uang TPA.</p>
2	Tingkat Kesehatan	<p>Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial. Dengan keadaan sehat setiap orang akan hidup produktif.</p> <p>a. Pemenuhan kebutuhan pangan</p>

		<p>yang bergizi.</p> <p>b. Pembelian obat-obatan</p>
3	Tingkat Pendapatan	<p>Pendapatan merupakan jumlah uang yang di terima atau di peroleh seseorang dari suatu aktivitas yang telah dilakukan. Dalam penerapannya kerjasama bagi hasil yang dilakukan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja sangat membantu kedua belah pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan</li> <li>b. Biaya pendidikan</li> <li>c. Biaya kesehatan</li> <li>d. Pemenuhan tempat tinggal yang layak</li> </ul>
4	Tingkat Perumahan	<p>Dikatakan sejahtera dalam hal tingkat perumahan jika status kepemilikan tempat tinggal ialah milik pribadi. Dalam penerapannya sebagian besar petani yang melakukan kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja dengan hasil</p>

		yang diterima digunakan untuk renovasi rumah dan hampir seluruh petani memiliki status kepemilikan pribadi terhadap rumah yang ditinggali.
--	--	--

*(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020)*



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dan bagi rugi yang dilakukan petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan sesuai kebiasaan setempat dengan perjanjian secara lisan atas unsur kepercayaan tanpa menetapkan jangka waktu perjanjian, mengenai presentase pembagian hasil telah disepakati pada saat akad. Perjanjian tersebut dalam hukum Islam belum sepenuhnya sah. Karena syarat sah melakukan perjanjian dalam bentuk akad *muzara'ah* atau *mukharabah* dalam Islam salah satunya harus menetapkan mengenai jangka waktu perjanjian pada saat akad agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak yang melakukan kerjasama. Namun kerjasama tersebut mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsure saling rela dan merupakan adat kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Dan dilakukan atas dasar kesepakatan pihak pemilik lahan menyerahkan kepada pihak penggarap untuk melakukan penanaman bawang merah serta perawatan sampai pada panen. Di pandang dari perspektif Ekonomi Islam kerjasama pertanian yang dilakukan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi



Islam yaitu asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, asas saling tolong menolong.

2. Perjanjian bagi hasil dan bagi rugi pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sudah memenuhi unsur keadilan. Hal ini bisa dilihat berdasarkan presentase pembagian hasil sesuai kontribusi masing pihak ada dua presentase imbalan bagi hasil yang digunakan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja yaitu jika pemilik lahan sekaligus pemodal imbalan bagi hasil 60:40. Jika lahan di siapkan oleh penggarap maka imbalan bagi hasil 50:50. Adapun pembagian rugi itu ditanggung kedua belah pihak misalnya jika terjadi gagal panen keduanya tidak mendapatkan apa-apa sehingga bisa dikatakan sama-sama menanggung kerugian dari sisi pemilik lahan rugi materi, dari sisi penggarap rugi waktu dan tenaga. Disamping itu kedua pihak yang melakukan perjanjian sudah melakukan kewajiban masing-masing serta memperoleh hak dari apa yang telah diusahakan. Sehingga hal tersebut sudah di rasa adil.
3. Kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar. Hasil kerjasama pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan petani. Pendapatan yang di peroleh dari bagi hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan sampai pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dalam hal ini memberikan saran dan masukan kepada petani khususnya yang melakukan kerjasama bagi hasil agar menggunakan tulisan meskipun hanya selembor kertas namun digunakan sebagai bukti ataupun saksi dalam melakukan kerjasama serta memperjelas semua rukun dan syarat kerjasama sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak. Selain itu peneliti juga menyarankan supaya tidak ada diskriminasi terhadap penggarap ataupun sebaliknya terjadi manipulasi dalam hal biaya kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran. Dan selalu mengutamakan perspektif Islam di dalam setiap tindakan agar tidak terjadi kecurangan antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Wahyuddin dkk “Mattesan Uma Membangun Konsep Bagi Hasil Pertanian Berbasis Keadilan Dan Kemashlahatan” *Jurnal KNAPPPTMA Ke-6*, Vol 6, No 3, (2017).
- Akib, Haedar “Implementasi Kebijakan” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No. 1 (2010), h. 2
- Almubarak, Fauzi “Keadilan dalam Islam” *Jurnal Istighna*, Vol 1, No. 2 (2018).
- Annisa, Ivony “Efisiensi Pemasaran Bawang Merah provinsi jawa tengah” *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol 8, No. 2, (2018).
- Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Dar Al Ittiba, 1999).
- Astuti, dkk “Pemetaan tingkat kesejahteraan keluarga di Kecamatan Banjarmasin selatan” *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol 4, No.2 (2017)..
- Hasnawi, Haris Faulidia, “Sistem Muzara’ah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Millah* Vol IV, No. 2 (2005).
- Awaluddin, Murtiadi. dkk “Al-adl sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty di Ternate” *Jurnal Al-Amwal*, Vol 5, No. 1 (2020).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kecana, 2009).
- Busthomi, Ahmad Otong. dkk “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Al-Mustashafa*, Vol 3, No. 2 (2018).
- Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah” *Jurnal Sulesana*, Vol 12, No. 2 (2018).
- Daramawati dan Rahmawati Muin “Penerapan Sistem Muzara’ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Iqtisaduna* Vol, 5 No. 2, (2016), h. 3.
- Dewi, Mayun Karina, dkk “Pengaruh Tingkat Produksi, Harga, Dan Konsumsi Terhadap Impor Bawang Merah di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 5 No. 1, (2016).
- Edi, Syafri “Pertumbuhan Dan Hasil Beberapa Varietas Bawang Merah Pada Dua Cra Tanam di Lahan Kering Dataran Rendah Kota Jambi” *Jurnal Agroecotenia*, Vol 2, No. 1, (2019).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Fahrurrozi, “Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing Dalam Ekonomi Islam” *Jurnal Iqtishadia*, Vol 3, No. 2 (2016).
- Gazaly Abdul Rahman, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).
- Ghafar, Ahmad affan dan Jumadi purwodjomo”Pemanfaatan barang gadai dalam perjanjian hutang dibawah tangan” *Jurnal Notarius*, Vol 12, No.1 (2019).

- Hafid, Wika Ramdhani dkk “Penerepan Prinsip Profit Sharing and Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar” *Jurnal Al-Mashrafiyah*, Vol 2, No. 1, (2018).
- Harisudin, M. Noor “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara “*AL-FIKR*, Vol 20, No.1 (2016).
- Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Hermawan, Sulhani “Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, No. 3 (2012).
- <http://alminist.blogspot.com/2010/08/fatwa-dsn-mui.html>.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2011).
- Inanna”Peran Pendidikan Dalam membangun Karkater Bangsa Yang Bermoral” *Jurnal Jekpend*, Vol 1, No 1 (2018).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid & Terjemah (Bandung, Al Cordoba, 2010), h. 47. Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Khasanah, Umrotul. “*The Practice Of Profit and Loss Sharing System For Rice Farms in East Java, Indonesia*” *Jurnal Of Business and Management*, Vol 9, No 3,(2013).
- Malik, Mochammad Kamil. dkk “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 12, No. 1 (2018).
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, (2012).
- M. Suryadinata “Al-Adl dalam perspektif Al-Qur’an” *Jurnal refleksi*, Vol II, No. 1, (2000).
- Muhamad, Rusnah dkk. “*Corporate Social Responsibility An Islamic Perspective*” *Jurnal Of Accounting Perspectives*, Vol 1, (2008).
- Nabhan, Fqih. “*Profit and loss sharing Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*” *Jurnal Muqtasid*, Vol 1, No. 2 (2010).
- Nasution, Zubaidah. “Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian” *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*, Vol 1, No. 1 (2016).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PrenamediaGroup, 2017).
- Nugraha, Jefri Putri. “Sistem Muzara’ah Sebagai Alternative Pembiayaan Pertanian Di Indonesia” *Jurnal Iqtishodia*, Vol 1, No. 2, (2016).
- Pardomuan, P “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam” *Jurnal Bisnis*, Vol 1 , No. 1 (2018).
- Priyadi Unggul dan Jannahar Saddam Ash Shiddiqie “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping,

- Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Jurnal Millah*, Vol. XV, No. 1, (2015).
- Primada, Beni Septytan. dkk “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah Studi Desa Temu Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Jestt*, Vol. 2, No.11, (2015).
- Rafly, Muhammad. dkk “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal hukum islam*, Vol. 11, No. 2, (2016).
- Rosni “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara” *Jurnal Geografi*, Vol, 9, No. 1 (2017).
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Saidy, Emily Nur, dkk “Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli” *Jurnal Laa Maisyir*, Vol 6, No. 1, (2019).
- Setiawan, Firman “Kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep Madura” *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8, No. 2 (2019).
- Sodiq, Amirus “Konsep kesejahteraan dalam Islam” *Jurnal Equilibrium*, Vol 3, No. 2 (2015).
- Soemitra, Andri. Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).
- Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Law and Justice*, Vol 2, No. 1 (2017).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Sucipto “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam” *Jurnal Asas*, Vol 7, No. 1 (2015).
- Sybly, M.Roem , “Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah” *Jurnal Millah*, Vol XV, No. 1, (2015).
- Syamsuddin, dkk “Pemberdayaan Petani Bawang Merah Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kolai Kabupaten Enrekang” *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, (2019).
- Wahyuni, Andi Sri. “Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Istiadat” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 4, No. 3 (2013).
- Wahyuningsih, Tri “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat” *Jurnal Komunitas*, Vol 3, No. 2 (2011).
- Waluyo, Bambang “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No. 2, (2016).

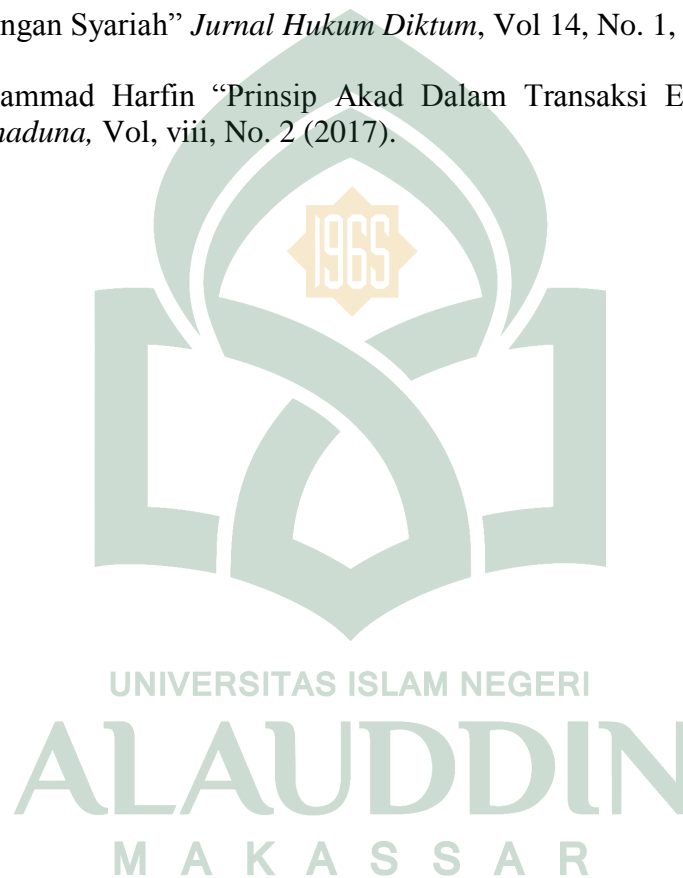
Wardani Dias rizqi dan Siti inayatul faizah, “Kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad muzara’ah dengan pendekatan maqashid syariah Tulungagung” jurnal Ekonomi syariah dan Teori terapan, Vol 6, No 7 (2019).

Yaqin, Ainul. Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam, (Duta Media Publishing, 2018).

Zainuddin, Djejen, Pendidikan Agama Islam Fikih, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012).

Zubair, Muhammad Kamal dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14, No. 1, (2016).

Zuhdi, Muhammad Harfin “Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi” *Jurnal Iqtishaduna*, Vol, viii, No. 2 (2017).



# LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### Manuskrip

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif memberikan pedoman hidup yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan manusia baik dalam bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah dalam kegiatan ekonomi seperti melakukan sebuah perjanjian. Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah semestinya diterapkan secara utuh dan total dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar umat. Salah satu bentuk perjanjian dalam Islam ialah perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian, Pertambahan jumlah penduduk di sangat mempengaruhi sektor lahan dimana jumlah lahan terus menyusut. Lahan-lahan yang awalnya sebagai lahan pertanian berubah menjadi area pemukiman. Hal tersebut mengakibatkan penguasaan lahan menurun dan petani yang tidak memiliki lahan meningkat.

Untuk itu peneliti bertujuan meneliti penerapan profit and loss sharing berbasis al-adl dalam meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Berkaitan dengan kasus di atas peneliti membuat pertanyaan terkait dengan informan untuk menunjang hasil penelitian.

Informan: Pemilik lahan

1. Sudah berapa lama bapak melakukan kerjasama bagi hasil pertanian?
2. Berapa luas lahan bawang merah yang bapak miliki?
3. Apa alasan yang mendasari bapak melakukan kerjasama bagi hasil pertanian?



4. Apakah bapak mengetahui bahwa bagi hasil pertanian di atur dalam undang-undang?
5. Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama yang bapak lakukan?
6. Apa saja yang Bapak sepakati pada saat melakukan perjanjian?
7. Apakah perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian yang bapak lakukan di catatkan oleh kepala desa setempat?
8. Siapakah yang menjual hasil panen?
9. Bagaimana perhitungan bagi hasil yang bapak lakukan?
10. Apakah setelah panen bapak mengeluarkan zakat pertaniannya?
11. Apakah selama bapak melakukan perjanjian kerjasama pertanian pernah mengalami gagal panen?
12. Apakah pada saat melakukan perjanjian bapak menyampaikan hal yang dapat mengakhiri perjanjian misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia atau ada uzr lain yang menyebabkan perjanjian tersebut berkakhir?
13. Bagaimana konsep keadilan menurut bapak dalam perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan?
14. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan penggarap selama bapak melakukan perjanjian kerjasama pertanian, Jika pernah bagaimana penyelesaian perselisihan tersebut?
15. Apakah menurut bapak dengan adanya perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga bapak, mulai dari

pemenuhan biaya pendidikan, kesehatan, tingkat pendidikan, pemenuhan tempat tinggal?

Informan: Penggarap lahan

1. Sudah berapa lama bapak menjadi penggarap ?
2. Apa yang menjadi alasan bapak melakukan kerjasama pertanian sebagai penggarap?
3. Apakah bapak sudah mengetahui hak dan kewajiban bapak selaku penggarap?
4. Apa saja yang disepakati pada saat melakukan perjanjian?
5. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pemilik lahan selama bapak melakukan kerjasama pertanian?
6. Bagaimana penentuan presentase bagi hasil yang bapak terapkan bersama pemilik lahan?
7. Apakah bapak sudah merasa adil dari presentase bagi hasil yang diterapkan?
8. Apakah selama bapak menggarap lahan pernah terjadi gagal panen?
9. Apakah menurut bapak dengan adanya perjanjian kerjasama bagi hasil meningkatkan kesejahteraan keluarga bapak?

Informan: Kepala Desa

1. Bagaimana potensi pertanian bawang merah di Desa Saludewata Kecamatan Anggeraja ?
2. Apa saja yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian kerjasama pertanian?
3. Sejak kapan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian bawang merah dilakukan?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan para petani bawang merah?
5. Apakah pemerintah setempat ikut berperan dalam penetapan bagi hasil yang digunakan para petani bawang merah?
6. Menurut bapak apakah pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sudah menerapkan prinsip keadilan?
7. Apakah pernah ada pelaporan mengenai sengketa atau perselisihan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama pertanian?
8. Menurut bapak apakah dengan adanya kerjasama pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani?



( Pak Jufri Juma, Kepala Desa Saludewata)



(Pak Sudarmin selaku pemilik lahan)



(Pak Syahrul selaku pemilik lahan)



(Pak Daen Selaku penggarap lahan).





(Pak Rahman Selaku Pemilik lahan)



(Pak Setiadi selaku pemilik lahan)



(Pak Nawar selaku pemilik lahan)



Salah satu lahan pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 140 Tahun 2020

**T E N T A N G**  
**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Astuti, L., Nim: 90100116072 tertanggal 22 Januari 2020 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "IMPLEMENTASI PROFIT AND LOSS SHARING PADA AKAD MUZARA'AH DI KABUPATEN ENREKANG (STUDI KASUS PERTANIAN BAWANG MERAH DI KECAMATAN ANGGERAJA)"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**M E M U T U S K A N**

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Dra. Hj. Nuraeni Gani, MMM
2. Dr. Nurfiah Anwar, S.Ei, M.Ei
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 22 Januari 2020  
Dekan,  
  
Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag  
NIP. 19601130 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sk. Alauddin No. 61 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. B. M. Yasin Lingsa No. 16 Selayar – Gowa Tlp. 841879 Fax. 8221400

Noor : SCIT / EB.FPP.00.9/9/2020  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Seminar Proposal  
A.n. Astuti L/90100116072

Samata, 29 September 2020

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing, untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing dan penguji pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 September 2020  
Waktu : 13.00 - 15.30 WITA  
Judul Skripsi : Implementasi Profit and Loss Sharing Pada Akad Muzara'ah Pertanian Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang  
Tempat : Dilakukan secara daring

Atas segala perhatian dan keahliannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prof. Dr. U. Abustand Ilyas, M.Ag.  
NID. 19661130 199303 1 003

**Catatan:**

- Pembimbing dan Penguji bersikapan:
- Laki-laki : Ketua dan Bendahar / Rutik
  - Wanita : Menyediakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2041 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN Ekonomi Islam FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Aswili** : NIM: 90160316073
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif Jurusan **Ekonomi Islam** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- |   |  |
|---|--|
| <b>Ketua</b>                            | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE, M.Si, Ak. |
| <b>Sekretaris</b>                       | : Akromurmas, SE., M.Si.                     |
| <b>Penguji Bidang Islamiyah</b>         | : Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag.                 |
| <b>Penguji Dasar Ekonomi Syariah</b>    | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.          |
| <b>Penguji Lembaga Keuangan Syariah</b> | : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.              |
| <b>Pelaksana</b>                        | : Roshani                                    |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 8 Oktober 2020  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abuslani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 1966130 199303 1 003

Salinan:

1. Rektori UIN Alauddin Makassar di Jemberin City
2. Wakil Rektori dan Wakil Wakil UIN Alauddin Makassar
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus 1 Jl. SH. Alauddin No. 63 Makassar Telp. (0411) 864828 Fax 864823  
 Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 56 Samata – Gowa Telp. 441809 Fax 8221400

Nomor : 2721 / FEB / FPP.05.9/11 / 2020  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : Undangan Seminar Hasil

Samata, 13 November 2020

Kepada Yth  
 Bapak/Ibu Pengajar dan Pembimbing  
 DI  
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : AS'ULIL  
 NIM : 90100116072  
 Jurusan : EKONOMI ISLAM  
 Judul Skripsi : Implementasi Profit and Loss Sharing berbasis Al-Qadl dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Suwang Merau di Kecamatan Anggana Kabupaten Enrekang

Yang saya Akhiri akan dilaksanakan pada :  
 Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2020  
 Waktu : 08.00 - 14.00 WTA  
 Tempat : Dilakukan secara online

Dengan undangan ini, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
  
 Dr. H. Abusani Iyax, M.Ag.  
 NIP. 19661130 199303 1 003

Catatan:  
 Bereslah dan terpuji hasilnya.  
 Laki-laki : Kemas dan Benar / Baik  
 Wanita : Menyenangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2369 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n. Arsyi L. NIM : 90100116072  
JURUSAN EKONOMI ISLAM, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : Surat Keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Arsyi L. NIM: 90100116072 untuk melaksanakan seminar hasil.
- Mengingat** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar hasil/hasil perlu dibentuk panitia dan tim pengji seminar hasil dan sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang ditembuskan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Biaya Anggaran Pendidikan dan Biaya Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 60 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 98 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Panitia dan Tim Pengji Seminar Hasil Jurusan EKONOMI ISLAM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Aburani Ilyas, M.Ag.
- Sekretaris** : Ahmad Efendi, SE, M.M.
- Pembimbing** : Dra. Hj. Nurani Gani, MM.
- Pembimbing II** : Dr. Nurrah Anwar, S.H.I., M.E.I.
- Penguji I** : Dr. Muh. Wahyudin Abdullah, SE, MSL, Ak.
- Penguji II** : Dr. L. H. Idris Parakkasi, MM.
- Pelaksana** : Muh. Iman Mas'ud
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, membuat bimbingan, petunjuk, petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan mahasiswa masalah penyusunan skripsi.
  2. Bkwa pelaksanaan seminar hasil, penelitian dibebaskan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
  3. Apabila pelaksanaan hari ternyata terdapat kesulitan dalam surat keputusan ini maka diadakan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, membuat bimbingan, petunjuk, petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa, dan dan kemampuan mahasiswa masalah penyusunan skripsi yang bersangkutan untuk dibekali dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samala-Gowa  
Pada tanggal : 13 November 2020

**DEKAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Prof. Dr. H. Aburani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003

Diketahui :

1. Ketua STK Alauddin Makassar (Kasubag Akademik)
2. Ketua STK Alauddin Makassar (Kasubag Administrasi)
3. ...

<b>PEMBAKAR</b> (Fahrunisa, SE)	<b>KASUBAG AKADEMIK</b> (Nurrah M. In, S.P., M. A)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I : J. E. K. Yasin (Jaya) No. 65 Makassar 71111 (Telp. 844928 Fax 844923)  
Kampus II : J. E. K. Yasin (Jaya) No. 36 Santa Susanna (Jaya) - Uluwu (Telp. 844869 Fax 84221440)

Nomor : 2576 / FAK.1 / PE.00.9 / 11 / 2020

Semula, November 2020

Ofat : Penling

Tempo : -

Hal : Undangan Ujian Munawasyah

Yayasan Yih

Bapak/Ibu Pengujian Pendidikan  
Tj

Mukazem

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Ujian  
Munawasyah Mahasiswa:

Nama : Adnan L.  
NIM : 90100116072  
Jurusan : EKONOMI ISLAM  
Judul Skripsi : "Implementasi Profil and Loss Sharing berbasis Al-Qad dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawang Merah di  
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang"

Yang harus Anda lakukan dilaksanakan pada :

Tarif Angkat : Senin, 23 November 2020  
Waktu : 09.00 - 12.00 Wita  
Tempat : Dilakukan secara daring

Dengan undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR  
DR. H. ABUSTANI ILYAS, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Cebdam

Pembimbing dan Pengujian Pendidikan:

- Lati Lat : Kasejahteraan Petani/ Bank  
- Wafita : Menpersikan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TANGGAL: 20 NOVEMBER 2020**

**TENTANG**

**PANTIA DAN TIM PENGULI MUNAQASYAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Kemendiknas :** 1. Surat Permenkemen Agama No. 181/M/2011/2012 tanggal 10 November 2012 tentang Ujian Skripsi/Munawaroh Jurusan : EKONOMI ISLAM untuk Ujian Skripsi/Munawaroh yang berlaku Implementasi Profesi dan Test Skripsi berakademi Al-Qur'an dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelajar Siswa Meraih al-Kesuksesan Anggaraji Kabupaten Enrekang
- Menyandang :** 2. Jikalau sudah terdapat dalam hal ini memuat persyaratan Ujian Skripsi/Munawaroh
- Menyandang :** 3. Jikalau untuk pelaksanaan dan pelaksanaan Ujian/Munawaroh perlu dibuatkan panitia ujian
- Menyandang :** 4. 1. Keputusan Menteri Agama No. 90 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 2006 tentang Perubahan UIN Alauddin Makassar  
4. Keputusan Menteri Agama No. 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Anggaraji Menegakkan dan Berprestasi Negara dan Ujian Kemahiran Agama  
5. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
6. Keputusan Menteri Agama No. 90 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar  
7. Keputusan Menteri Agama No. 325/2007 tentang Perubahan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Dekan/Pemimpin yang bertanggung jawab dalam Ujian Anggaraji  
8. Surat Keputusan Dekan UIN Alauddin Makassar No. 241/B Tahun 2010 tentang Peraturan Fakultas UIN Alauddin Makassar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** 1. Panitia Ujian Skripsi/Munawaroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Prof. Dr. H. Abubakar Ilyas, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. H. Rahmatul Muin, M.Ag.  
Pengji I : Dr. Muh. Wahyudin Abdillah, ST, M.Si, Ak.  
Pengji II : Dr. H. Idris Pambakri, MM  
Pembimbing I : Dra. Hj. Huseini Gani, WAW  
Pembimbing II : Dr. Nurhikmah, S.H., M.Si  
Pelaksana : Muh. Idris Mas'ud
2. Panitia bertugas melaksanakan Ujian Skripsi/Munawaroh bagi siswa yang namanya terdapat dalam
3. Daftar nama siswa dan ditetapkan sebagai anggota Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
4. Apabila ditemukan hal yang melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini dan sudah dipaparkan sebagaimana mestinya

Keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT.

Ditandatangani : Samara-Gewa  
Pada tanggal : 20 November 2020

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

YUSUF DR. H. ABUBAKAR ILYAS, M.Ag.  
NIP. 195611301993031005

KELENGKAHAN  
KELENGKAHAN  
KELENGKAHAN

KELENGKAHAN  
KELENGKAHAN  
KELENGKAHAN

## Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-Adl dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

### ORIGINALITY REPORT

**17** %

SIMILARITY INDEX

**17** %

INTERNET SOURCES

**3** %

PUBLICATIONS

**4** %

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.uin-alaud-din.ac.id">repository.uin-alaud-din.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://journal.uin-alaud-din.ac.id">journal.uin-alaud-din.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://e-journal.unair.ac.id">e-journal.unair.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://www.syekhnurjati.ac.id">www.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://ejurnal.stainparepare.ac.id">ejurnal.stainparepare.ac.id</a> Internet Source	1%



9	<a href="http://fiki.muamalah.blogspot.com">fiki.muamalah.blogspot.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://e-journal.stit-islamic-village.ac.id">e-journal.stit-islamic-village.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
12	Namira Amalia Assagaf. "Konsep Profit and Loss Sharing (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk", <i>JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)</i> , 2020 Publication	1%
13	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes

On

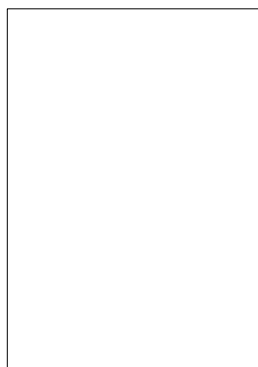
Exclude matches

&lt; 1%

Exclude bibliography

On

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Astuti. L, lahir di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tanggal 12 Maret 1998 dari pasangan suami istri Lahaming dan Mari. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Pertama kali penulis melangkah kaki ke dunia pendidikan pada tingkat sekolah dasar di SDN 132

Malele pada tahun 2005-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 3 Alla di Kabupaten Enrekang pada tahun 2011-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah kejuruan di SMKN 1 Enrekang pada tahun 2014-2016.

Kemudian setelah tamat SMK tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan dan mendaftar pada salah satu perguruan tinggi di Makassar yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jalur UMM dengan mengambil jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Selama menempuh pendidikan penulis aktif dalam beberapa organisasi baik ekstra kampus maupun intra kampus. Diantaranya UKM Cabang Olahraga dan HMJ Ekonomi Islam sedangkan pada lembaga ekstra penulis bergabung pada salah satu lembaga yang berasal dari tempat lahir penulis yakni HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu) dan Kreasita (Kerukunan Pelajar Dan Mahasiswa Desa Taulo).